



2023

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B
JL. PB Sudirman No.97 Karangasem, Patoan, Kec. Situbondo,
Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telp/Fax : (0338) 671397 , 671545 672 700
Email : itpnsitubondo@gmail.com Web : www.pn-situbondo.go.id



pn_situbondo



@Negeri Situbondo



pengadilannegrisitubondo

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023, yang intinya memuat laporan capaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo selama kurun waktu satu tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, yang berpendoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo di tahun 2023 merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, program – program yang telah dilaksanakan dimaksud sebagai bentuk peran aktif Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka mewujudkan *good governance*, diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Situbondo dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi untuk Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Situbondo yang telah melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo serta semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini , semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa melimpah rahmat dan hidayatnya kepada kita semua , Amiin

Situbondo, 29 Januari 2024

Ketua



ACHMAD RASJID ,SH.

NIP. 19740915 200003 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023 adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban instansi dalam memberikan Laporan kinerja Instansi Pemerintah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, LKjIP tahun 2023 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4108/SEK/OT.1.1/12/2023, tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2023

Adapun LKjIP intinya adalah melaporkan perkembangan dan capaian kinerja selama tahun 2023 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Situbondo. Penyusunan LKjIP tahun 2023 merupakan implementasi tahun kedua dalam Renstra 2020 - 2024 yang memuat 8 (Delapan) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
5. Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan
6. Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang baik
7. Mewujudkan pelayanan kesekrearian yang prima
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja dari Pengadilan Negeri Situbondo adalah masalah penyelesaian perkara tingkat pertama, sehingga penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun capaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta



anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Situbondo, tahun 2023. Program tersebut adalah :

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebesar 103,32%.

Rincian capaian kinerja dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100 %	100 %	100 %
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	20 %	0 %	0 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	97%	114 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi :	90%	99%	101%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %	0 %	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	98,30 %	109,2%
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	106%	882%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50 %	25 %	50 %



	Pengadilan				
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90 %	100 %	111%
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	97 %	100 %	103 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minamal " BB "	75	70,6	94,1 %
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	0 %	0 %
		c. Nilai IPK	92 %	97,2 %	105,65 %
		d. Nilai IKM	92 %	95,7 %	104%
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"	"A"	100%
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %	100 %	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	95 %	95,51 %	100,1%
		h. Prosestase pelaporan LHKPN/ LHKASN tepat waktu	98 %	100 %	102 %
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	95 %	93,51 %	97,90 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %	100 %	103 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %	0 %	0 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1	1	100 %
		b. Jumlah Kapasitas bandwicth yang memadai	50 Mpbs	100 Mpbs	200 %
		c. Prosestase distribusi surat	100 %	100 %	100 %
		d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98 %	100 %	102 %
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	98 %	100 %	102%
		f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	3	8	260 %
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	35	81	230 %
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5	6	120%
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Orang	1211 Orang	655 %
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	34 Orang	96 orang	282 %
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	94 %	100 %	106 %



		I. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/ 1540M2	1/ 1540 M2	100 %
		m. jumlah Pemeliharaan rumah dinas	7 /884 M2	7 / 884 M2	100 %
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	94 Unit	94 Unit	100 %
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan ayanan ayanan	12 bulanan ayanan ayanan	100 %
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %	100 %	125 %
Rata – Rata Capaian Kinerja					129,29%

Table : Prosentase capaian kinerja Tahun 2023

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam tiga tahun terakhir. Target perkara yang diselesaikan tepat waktu ditetapkan adalah 100%, sedangkan realisasi yang dicapai adalah Perkara 100 %

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara Tahun 2023 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 92,84 %, sedangkan untuk DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya mencapai 98,18 %.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	Vi
DAFTAR TABEL	Vii
DAFTAR GAMBAR	Xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis 2020-2024	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	18
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	38
C. Realisasi Anggaran	105
BAB IV PENUTUP	119
 LAMPIRAN	
- Struktur Organisasi	
- Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan 2024	
- SK Tim Penyusun LKJiP tahun 2023	
- Pohon Kinerja	



Daftar tabel

No	Table	Uraian	hal
1	Tabel 1	Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo	3 - 4
2	Tabel 2	Gedung Pengadilan Negeri Situbondo	4 - 5
3	Tabel 3	Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Situbondo	5
4	Tabel 4	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	6
5	Tabel 5	Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Situbondo	6
6	Tabel 6	Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	17 - 18
7	Tabel 7	Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo	18 - 19
8	Tabel 8	Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023	21 - 22
9	Tabel 9	Anggaran dan realisasi DIPA 01 tahun 2023	23
10	Tabel 10	Anggaran dan realisasi DIPA 03 tahun 2023	23
11	Tabel 11	Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023	26
12	Tabel 12	Prosentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023	27- 29
13	Tabel 13	Tabel Skala Nilai Ordinal Capaian Kinerja	29
14	Tabel 14	Kategori Penilaian Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo TH 2023	30 - 31
15	Tabel 15	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2023	32 - 33
16	Tabel 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target akhir jangka menengah	34 - 35
17	Tabel 17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia)	35 - 36
18	Tabel 18	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1	39
19	Tabel 19	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	40
20	Tabel 20	Perbandingan capaian kinerja tepat waktu	40 - 41
21	Tabel 21	Persentase capaian Kinerja putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	43
22	Tabel 22	Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2023	44
23	Tabel 23	Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023	44
24	Tabel 24	Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2023	45
25	Tabel 25	Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023	45



26	Tabel 26	Perbandingan Capaian Kinerja perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	46
27	Tabel 27	Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023	47
28	Tabel 28	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023	48
29	Tabel 29	Perbandingan Capaian Kinerja Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	48
30	Tabel 30	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 2	49
31	Tabel 31	Prosentase Capaian salinan putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu Tahun 2021 - 2023	50 - 51
32	Tabel 32	Persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi	51
33	Tabel 33	Persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023	52
34	Tabel 34	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3	52
35	Tabel 35	Persentase Capaian perkara prodeo yang diselesaikan	53
36	Tabel 36	Perbandingan capaian Kinerja perkara prodeo yang diselesaikan tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023	54
37	Tabel 37	Persentase Capaian perkara perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan	54
38	Tabel 38	Perbandingan Capaian Kinerja perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023	55
39	Tabel 39	Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu	55 - 56
40	Tabel 40	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2023	56
41	Tabel 41	Perbandingan Capaian Kinerja pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023	56
42	Tabel 42	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 4	57
43	Tabel 43	Persentase Capaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi) tiga tahun terakhir Tahun 2021 - 2023	58
44	Tabel 44	Persentase Capaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	58
45	Tabel 45	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 5	59
46	Tabel 46	Nama Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan Manajeria	61
47	Tabel 47	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	61
48	Tabel 48	Persentase Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	63
49	Tabel 49	Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2023	63



50	Tabel 50	Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	64
51	Tabel 51	Perbandingan capaian layanan kenaikan pangkat tepat waktu	64
52	Tabel 52	Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2023	65
53	Tabel 53	Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2023	65
54	Tabel 54	Perbandingan Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu	65 - 66
55	Tabel 55	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 6	66
56	Tabel 56	Persentase capaian Nilai LKJiP	68
57	Tabel 57	Perbandingan Persentase capaian Nilai LKJiP	68
58	Tabel 58	Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM	69
59	Tabel 59	Perbandingan Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM	70
60	Tabel 60	Persentase capaian Nilai IPK	71
61	Tabel 61	Persentase capaian Nilai IPK	72
62	Tabel 62	Perbandingan Persentase capaian Nilai IPK	72
63	Tabel 63	HASIL IKM e –Survey Badilum Tahun 2023	73
64	Tabel 64	Persentase capaian Nilai IKM	74
65	Tabel 65	Perbandingan Persentase capaian Nilai IKM	74
66	Tabel 66	Prosentase Capaian Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	75
67	Tabel 67	Persentase Perbandingan capaian Predikat (APM)	76
68	Tabel 68	Prosentase Capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	77
69	Tabel 69	Persentase Perbandingan Realisasi PNBP	77-78
70	Tabel 70	Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023	78
71	Tabel 71	Persentase Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023	78
72	Tabel 72	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021-2023	79
73	Tabel 73	Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2023	80
74	Tabel 74	Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2023	80
75	Tabel 75	Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2021-2023	81
76	Tabel 76	Persentase Nilai Kinerja Anggaran	81
77	Tabel 77	Nilai Kinerja Anggaran Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021 – 2023	82
78	Tabel 78	Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Situbondo Tahun 2023	83
79	Tabel 79	Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun	84



		2023	
80	Tabel 80	Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023	84-85
81	Tabel 81	Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2023	85
82	Tabel 82	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7	86
83	Tabel 83	Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan Tahun 2023	87
84	Tabel 84	Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2023	88
85	Tabel 85	Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2023	90
86	Tabel 86	Jumlah Pendistribusian Surat Masuk di Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021-2023	90
87	Tabel 87	Capaian Kinerja Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Tahun 2023	91
88	Tabel 88	Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2023	92
89	Tabel 89	Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2023	93
90	Tabel 90	Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2023	94
91	Tabel 91	Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2023	95
92	Tabel 92	Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2023	97
93	Tabel 93	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2021-2023	97
94	Tabel 94	Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2023	98
95	Tabel 95	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021-2023	99
96	Tabel 96	Capaian Kinerja Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2023	99
97	Tabel 97	Realisasi Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian	100
98	Tabel 98	Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2023	100
99	Tabel 99	Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2023	102
100	Tabel 100	Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan / Mesin Kantor Tahun 2023	102-103
101	Tabel 101	Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2023	103
102	Tabel 102	Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 8	104
103	Tabel 103	Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2023	105



104	Tabel 104	Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Situbondo 2023	108
105	Tabel 105	Realisasi Belanja DIPA 03	109
106	Tabel 106	Penyerapan Anggaran DIPA 01 : DIPA Badan Usaha	111-
		Administrasi (098221)	115
107	Tabel 107	Penyerapan Anggaran DIPA 03 : DIPA 03 Badan Peradilan Umum (099146)	116- 118



DAFTAR GAMBAR

NO	Gambar	Uraian	Hal
1	Gambar 1	Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo	3
2	Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo	9
3	Gambar 3	Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo	24
4	Gambar 4	Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021	37
5	Gambar 5	Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas	37
6	Gambar 6	Nilai AKIP Tahun 2022 Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya	38
7	Gambar 7	Piagam Penghargaan (EIS) Evaluasi Implementasi SIIP dari Pengadilan Tinggi Surabaya,	42
8	Gambar 8	Aplkasi SIKEP	61
9	Gambar 9	Monitoring Kelengkapan data SIKEP	62
10	Gambar 10	Monitoring Kelengkapan E – DOC SIKEP	62
11	Gambar 11	Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas	67
12	Gambar 12	Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun Tahun 2023	67
13	Gambar 13	Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021	68
14	Gambar 14	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019	70
15	Gambar 15	Nilai IPK Terwulan I Si Super	71
16	Gambar 16	Nilai IPK Terwulan II Si Super	71
17	Gambar 17	Nilai IPK Terwulan III Si Super	71
18	Gambar 18	Nilai IPK Terwulan IV Si Super	71
19	Gambar 19	Nilai SKM Terwulan I Si Super	73
20	Gambar 20	Nilai SKM Terwulan II Si Super	73
21	Gambar 21	Nilai SKM Terwulan III Si Super	73
22	Gambar 22	Nilai SKM Terwulan IV Si Super	73
23	Gambar 23	Sertifikat Predikat APM tahun 2022	75
24	Gambar 24	Assesment Survelence Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2023	76
25	Gambar 25	IKPA DIPA 01	82
26	Gambar 26	Tampilan aplikasi Santri	88
27	Gambar 27	Grafik Laporan Ketersediaan Banwith Internet Tahun 2023	89
28	Gambar 28	Distribusi Surat Melalui Aplikasi PTSP +	90
29	Gambar 29	TindakLanjut Surat Tepat Waktu Melalui Aplikasi PTSP +	91
30	Gambar 30	Register Surat Masuk Pada Aplikasi PTSP +	92
31	Gambar 31	Register Surat Keluar Pada Aplikasi PTSP +	93



32	Gambar 32	Buku Register Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Tiap Bagian	93
33	Gambar 33	Berita Yang Dimuat Di Website Pengadilan Negeri Situbondo	95
34	Gambar 34	Ruang PTSP Pengadilan Negeri Situbondo	96
35	Gambar 35	Register Tamu PTSP + Pengadilan Negeri Situbondo	98



BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Situbondo merupakan lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari birokrasi , kerana merupakan salah satu dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Situbondo dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Negeri Situbondo dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Pengadilan Negeri Situbondo memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya. Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Situbondo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2023 untuk mencapai visi dan misinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Situbondo berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan tersebut.

Pengadilan Negeri Situbondo yang merupakan salah satu satuan kerja dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Situbondo, Provinsi Jawa Timur, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

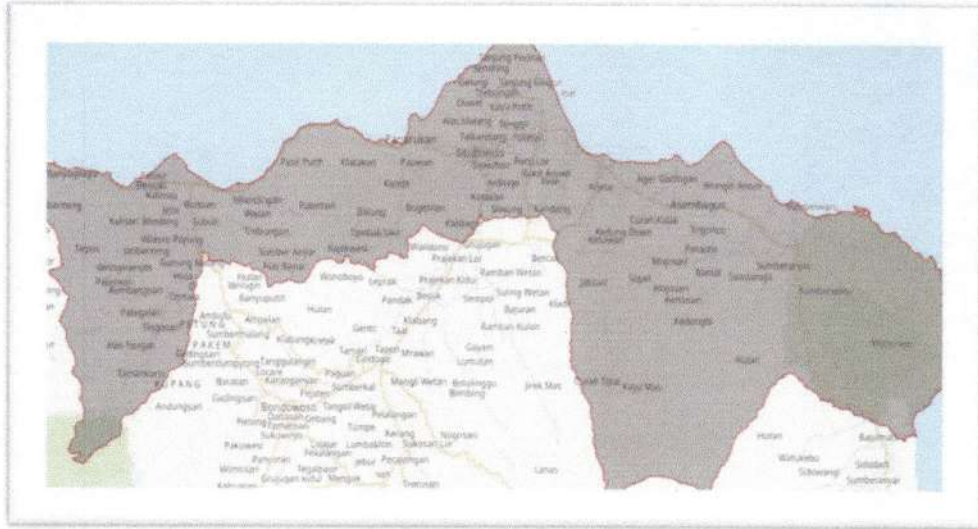
Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum Penyusunan laporan - laporan tersebut adalah Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Permenpan No. 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Situbondo terletak di Ibukota Provinsi Jawa Timur , beralamat diJalan Panglima Besar Sudirman Nomor 97 Situbondo, wilayah hukum terdiri dari : 17 Kecamatan , 132 Desa , 4 Kelurahan .

a. Letak Geografis

Kabupaten Situbondo terletak antara 7° 35' – 7° 44' LS dan 113° 30' – 114° 32' BT, dimana disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah Timur berbatasan dengan selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, Sebelah barat berbatasan dengan Probolinggo



Gambar 1 : Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo

b. Wilayah hukum

Secara administrasi kabupaten Situbondo terdiri dari : 17 Kecamatan , 132 Desa , 4 Kelurahan adalah sebagai berikut :

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
Arjasa		8	Desa	Arjasa , Bayeman, Curah Tatal, Jatisari, Kayumas,Kedungdowo, KetowanLamongan
Asembagus		10	Desa	Asembagus,Awar-awar, Bantal,Gudang,Kedunglo,Kertosari,Mojosari,Parante, Trigonco,Wringin Anom
Banyuglugur		7	Desa	Banyuglugur,Kalianget,Kalisari, Lubawang,Selobanteng, Telempong,Tepos
Banyuputih		5	Desa	Banyuputih,Sumberanyar, Sumberejo,Sumberwaru, Wonorejo
Besuki		10	Desa	Besuki,Blimbing,Bloro,Demung, Jetis,Kalimas,Langkap,Pesisir, Sumberejo,Widoropayung
Bungatan		7	Desa	Bletok,Bungatan,Mlandingan Wetan,Pasir Putih,Patemon, Selowogo,Sumbertengah
Jangkar		8	Desa	Agel,CurahKalak,Gadingan, Jangkar,Kumbang Sari,Palangan ,Pesanggrahan,Sopet
Jatibanteng		8	Desa	Curahsuri,Jatibanteng, Kembang Sari,Pategalan, Patemon,Semambung, Sumberanyar,Wringinanom



Kapongan		10	Desa	Curah Cottok, Gebangan, Kandang, Kapongan, Kesambi Rampak, Landangan, Peleyan, Pokaan, Seletreng, Wonokoyo
Kendit		7	Desa	Balung, Bugeman, Kendit, Klatakan, Kukusan, Rajekwesi, Tambak Ukir
Mangaran		6	Desa	Mangaran, Semiring, Tanjung Glugur, Tanjung Kamal, Tanjung Pecinan, Trebungan
Mlandingan		7	Desa	Alas Bayur, Campoan, Mlandingan Kulon, Selomukti, Sumberanyar, Sumber Pinang, Trebungan
Panarukan		8	Desa	Alasmalang, Duwet, Gelung, Kilensari, Paowan, Peleyan, Sumberkolak, Wringinanom
Panji		10	Desa	Battal, Curah Jeru, Juglangan, Kayu Putih, Klampokan, Panji Kidul, Panji Lor, Sliwung, Tenggir, Tokelan
Panji	2		Kelurahan	Ardirejo, Mimbaan
Situbondo		4	Desa	Kalibagor, Kotakan, Olean, Talkandang
Situbondo	2		Kelurahan	Dawuhan, Patokan
Suboh		8	Desa	Buduan, Cemara, Dawuan, Gunung Malang, Gunung Putri, Ketah, Mojodungkol, Suboh
Sumber Malang		9	Desa	Alastengah, Baderan, Kalirejo, Plalangan, Sumberargo, Taman, Tamankursi, Tamansari, Tlogosari
17	4	132		

Tabel 1 : Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo

Dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 3 (tiga) buah gedung yang terletak pada Gedung Pengadilan Negeri Situbondo Gedung utama yang dibangun pada tahun 1985 telah mengalami aksi kerusakan 10 Oktober 1996 sehingga menimbulkan Gedung Pengadilan Negeri Situbondo rusak total yang tersisa hanya gedungnya, kemudian saat itu dilaksanakan renovasi beserta mebelernya. Adapun jumlah sarana dan prasarana gedung dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Lokasi Tanah dan Gedung	Luas Tanah (M ²)	Keterangan
1.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	5168	Tanah Kantor Bersertifikat No.32 /1984. Pemerintah RI.



			Cq. MARI
2.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	753	Tanah Gedung Kantor Lantai 1
3.	Jl. P.B. Sudirman 97 Situbondo	153	Tanah Gedung Kantor Lantai 2
4.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	1480	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 6/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI
5.	Jl. Pelabuhan No. Desa dan Kec. Asembagus, Kab. Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Asembagus
6.	Jl. Desa dan Kec. Besuki, Kab. Situbondo	1080	Tanah Kantor Balai sidang Bersertifikat No. 13/1984. Pemerintah RI. Cq. MARI.
7.	Jl. Desa dan Kec. Besuki, Kab. Situbondo	328	Tanah Gedung Balai Sidang Besuki

Tabel 2 : Gedung Pengadilan Negeri Situbondo

Untuk menunjang kesejahteraan Hakim maupun pegawai Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 8 (Delapan) rumah Negara namun sebagian mengalami kerusakan diatas 40% sesuai dengan penilaian ambang batas kerusakan gedung yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Situbondo pada tahun 2019. Sehingga hanya beberapa rumah yang layak dihuni oleh pimpinan dan para Hakim. Adapun jumlah rumah negara dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Alamat	Kondisi	Luas Tanah & Bangunan	Peruntukan	Sertifikat	Ket
1.	Jl.PB.Sudirman No.97	Baik	285 / 197	KPN	MARI	Ditempati / Type 45
2.	Jl.PB.Sudirman No.97	Baik	323/ 68	WKPN	MARI	Ditempati/ Type 36
3.	Jl.PB.Sudirman No.97	Baik	323 / 68	Hakim	MARI	Ditempati/ Type 36
4.	Jl.Santana No.1	Rusak Ringan	390/ 123,5	Panitera	MARI	Ditempati/ Type 45
5.	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lumbung 1	Baik	290 / 97	Hakim	MARI	Ditempati / Type 36
6	Jl.P.B.Sudirman Gg.Lumbung 2	Baik	290 / 97	Hakim	MARI	Ditempati / Type 36
7.	Jl.Argopuro No.18	Rusak sedang	420/191,25	Kosong	MARI	Kosong/ Type 45

Tabel 3 : Rumah Dinas Hakim Pengadilan Negeri Situbondo

Untuk menunjang mobilitas rutin pimpinan maupun operasional kantor, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki 4 (Empat) unit kendaraan bermotor roda 4 dan 6 (enam) kendaraan bermotor roda 2 yang digunakan untuk operasional pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Panitera dan Sekretaris unit kendaraan roda 4 merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo



pada tahun 2017. Adapun jumlah sarana kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis/Merk	Tahun	No.Pol	Kondisi	Asal Perolehan
1.	K. Innova	2017	P 05 EP	Baik	Pinj.Pakai
2.	K. Innova E.xw4	2009	P 1048 H	Baik	APBN
3.	D. Terrios TX	2012	P 1439 EP	Baik	APBN
4.	D. Terrios TS	2011	P 1435 EP	Baik	APBN
5.	Honda NF 125D	2008	P 5592 EP	Baik	APBN
6.	Honda NF 125 TD	2008	P 2446 EP	Baik	APBN
7.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5784 EP	Baik	APBN
8.	Honda GL.Pro.160	2006	P 5783 EP	Baik	APBN
9	Honda GL.Max125	2003	P 3041 EP	Baik	APBN
10	Suzuki RC.100	1996	P 5890 EP	R. Berat	APBN

Tabel 4 : Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

Pada periode 31 Desember 2023 jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 38 orang, jumlah tersebut jauh dari standar ideal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan buku pedoman administrasi peradilan tahun 2007. Adapun rincian jumlah sumber daya manusia pada tahun 2023 sebagai berikut

No	Jabatan	Jumlah	
		Laki – laki	Perempuan
1	Ketua	1	-
2	Wakil Ketua	1	-
3	Hakim	5	-
4	Panitera	1	-
	Sekretaris	1	-
5	Panmud Perdata	1	-
6	Panmud Pidana	1	-
7	Panmud Hukum	1	-
8	Ka.Sub Bag. Keegawaian dan Ortala	1	-
9	Ka.Sub Bag. Perencanaan, Tehnologi Informatikan dan Pelaporan	1	-
10	Ka.Sub Bag. Umum dan Keuangan		1
11	Panitera Pengganti	4	1
12	Jurusita	1	-
13	Jurusita Pengganti	3	1
14	Staf. Kepaniteraan	1	1
15	Arsiparis	0	0
16	Pustakawan	0	0
17	Staf Kesekretariatan	-	1
18	Pengelola BMN	-	1
19	Pranata Komputer	-	-
20	Tenaga PMPN	9	-
	Jumlah	32	6

Tabel 5 : Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Situbondo

B. KEDUDUKAN , WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-



Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Situbondo sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Wewenang dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Pengadilan Pengadilan Negeri Situbondo sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam **lingkungan Peradilan Umum**, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 Yaitu :

- a. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.(pasal 2)
- b. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.(pasal 3 ayat 1)
- c. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. (pasal 3 ayat 2)

2. WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai *Judicial Power*, adalah :

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta;



- c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Situbondo menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

- 1) FUNGSI PERADILAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) FUNGSI NASEHAT
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
- 3) FUNGSI ADMINISTRATIF

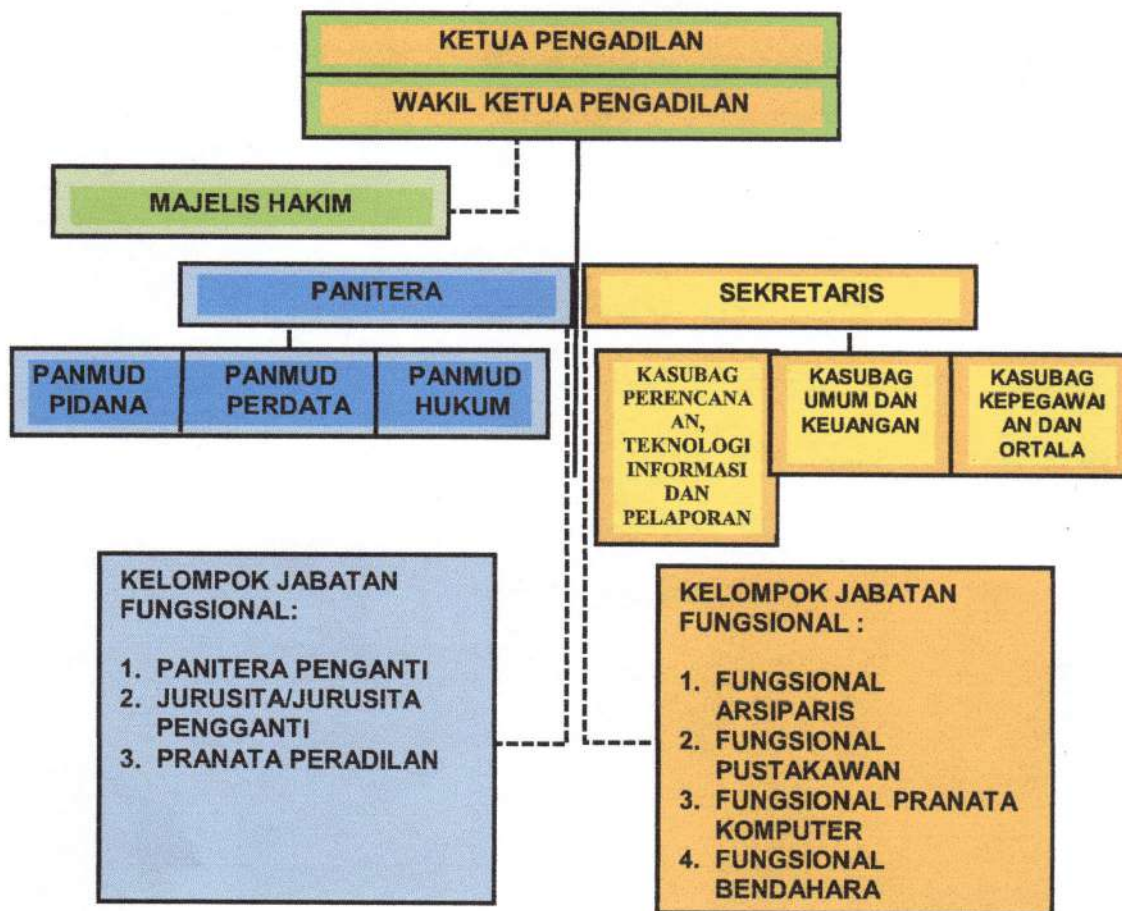
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- 4) FUNGSI LAIN

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan Pelayanan pelaksanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat serta memberikan informasi melalui website Pengadilan negeri Situbondo yang dapat di akses oleh masyarakat sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.



C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2019. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Ketua Pengadilan Negeri**

Ketua Pengadilan Negeri bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas, tingkah laku dan kode etik Hakim, Panitera , Sekretaris, Jurusita di daerah hukumnya dan melaporkan Pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan dapat memberikan keterangan hukum kepada Instansi Pemerintah daerahnya , apabila diminta.

2. **Wakil Ketua Pengadilan Negeri.**

Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Negeri apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas atau yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya



3. Hakim

Hakim bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Pidana maupun Perkara Perdata di tingkat pertama serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.

4. Panitera

Panitera Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dalam melaksanakan tugas Panitera menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi , pembinaan , dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana .
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata .
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Khusus
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, menyajikan data perkara dan transparansi perkara .
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dari APBN dalam program teknis dan keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, monitoring, evaluasi , minutas dan administrasi kepaniteraan
- g. Pelaksanaan Mediasi .
- h. Pembinaan teknis kepanitera dan kejurusitaan dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

5. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi , keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Negeri Situbondo, dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- d. Pelaksanaan urusan keuangan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- f. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- g. Pelaksanaan urusan surat mneyurat , arsip, perlengkapan , rumah tangga , keamanan , keprotokolan dan perpustakaan , dan



- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo

6. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas pidana
- b. Pelaksanaan register perkara pidana
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan .
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik .
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimunutasi .
- h. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir .
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

7. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaan kelengkapan berkas perdata
- b. Pelaksanaan register perkara perdata
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimunutasi .
- e. Pelaksanaan pemberitahuan salinan putusan tingkat pertama kepada para



pihak yang tidak hadir .

- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi , peninjauan kembali
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan salinan putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan risalah penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung .
- i. Pelaksanaan penerimaan Konsinyasi
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
- k. Pelaksanaan penyimpanan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

8. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara , penataan aersip perkara serta pelaporan, dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Hukum menyelengga- rakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan , pengelolaan dan penyajian data perkara
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- d. Pelaksanaan penataan , penyimpanan , dan pemeliharaan arsip perkara
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk peniitipan berkas perkara
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan – bahan yang berkaitan dengan tranparansi perkara
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat , hubungan masyarakat
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian , organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian , organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian , penataan organisasi dan tata laksana

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan , Tehnologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai



tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

12. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

13. Jurusita / Jurusita Pengganti

Jurusita / Jurusita Pengganti mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Organisasi

ISU INTERNAL

1. Aspek Proses Peradilan

Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan karena mediasi memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian perkara .

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Adanya kekurangan tenaga Staf untuk menangani administrasi perkara dan umumnya para Staf yang ada juga merangkap jabatan lain, selain itu tenaga honorer yang bertugas sebagai cleaning service juga diperbantukan di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan sehingga tidak dapat fokus pada satu pekerjaan;



- b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Situbondo

3. Aspek Sarana Dan Prasarana

Terdapat beberapa fasilitas yang belum memadai mendukung dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

ISU EKTERNAL

1. Aspek Proses Peradilan

- a. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan pada umumnya.
- b. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.
- c. Masih ada permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi serta nilai-nilai peradilan yang *excellent* belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
- d. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan perkara secara elektronik ;
- e. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a. Distribusi Hakim dan aparaturnya peradilan yang belum merata ;
- b. Adanya rangkapan pekerjaan antara staf dan jurusita pengganti ;

3. Aspek Pembinaan Dan Pengawasan

Adanya program akreditasi dan pembanguana ZI yang dicanangkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum yang menuntut agar jajaran dibawahnya selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan peradilan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antarlain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan.

Selanjutnya dalam RPJPN dinyatakan bahwa tahapan pembangunan aparatur Negara pada RPJMN 2020 - 2024 diarahkan pada peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Situbondo diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program - program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Situbondo.

1. VISI dan MISI

a. VISI

Visi adalah Suatu gambaran yang dituangkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Situbondo

Visi Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yaitu :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung ”

b. MISI

Misi adalah Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Situbondo menetapkan **misi** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari



- keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Situbondo.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Situbondo .

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Situbondo yang mandiri, transparansi dan Akuntabel;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 – 2024 , Reviu sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator



Kinerja Utama selama tahun 2020 – 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Kepercayaan public atas layanan Peradilan	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi. f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi para pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum).
Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase layanan umum dan peningkatan ASN
	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase layanan perkantoran dan pendukung kinerja b. Gaji dan Tunjangan c. Pengelolaan SDM
	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pelayanan terhadap pengguna layanan peradilan b. Operasional dan Pemeliharaan kantor



	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.
--	--	--

Tabel 6 : Hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

B. Rencana Kinerja Tahunan 2023

Sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, maka ditetapkanlah sebuah rencana kegiatan tahunan. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo, sebagai berikut.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100 %
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	20 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85 %
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90 %
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data	97 %



		kepegawaian			
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %		
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %		
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal "BB"	75		
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK		
		c. Nilai IPK	92%		
		d. Nilai IKM	92 %		
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"		
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %		
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %		
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98 %		
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	95 %		
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %		
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %		
		7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
				b. Jumlah Kapasitas bandwidth yang memadai	50 Mbps
c. Prosestase distribusi surat	100 %				
d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98 %				
e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %				
f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	3				
g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35				
h. Jumlah layanan di Pengadilan	5				
i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Orang				
j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	34 Org				
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %				
l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 M2				
m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 M2				
n. Jumlah Pemeliharaan peralatan / mesin kantor	94 Unit				
o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12				
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %		

Tabel 7 : Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023



C. Perjanjian Kinerja tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuandan sasaran Pengadilan Negeri Situbondo , menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja ini telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo , sebagai berikut.



No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100 %
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	20 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85 %
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	97 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal " BB "	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK
		c. Nilai IPK	92%
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %



		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98 %
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	95 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwidth yang memadai	50 Mbps
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98 %
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	3
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Orang
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	34 Org
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 M2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 M2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan / mesin kantor	94 Unit
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %

Tabel 8 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo

Dalam proses pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut diatas, didukung oleh pagu anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Administrasi, dengan rincian program sebagai berikut.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp. 96.740.000,-
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 5.526.558.000,-



Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Barang	78.440.000,00	77.015.500,00	98,18 %	1.1425..000	1,82 %
Kimwasmat	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	0	0 %
Pos Bankum	16.800.000,00	16.800.000,00	100 %	0	0 %
Total	96.740.000,00	95.315.000,00	98,18 %	1.1425..000	1,82%

Table 9 : Anggaran dan realisasi DIPA 01

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Pegawai	4.085.459.000,00	3.708.119.249,00	90,76 %	395 .339.751,00	- 6,34%
Barang	1.441.099.000,0	1.423.021.522,0	98,75 %	18.077.479,00	01, 75%
Modal	0	0		0	
Total	5.526.558.000	5.131.140.771	92, 84%	395.417.229	(7,16%)

Table 10 : Anggaran dan realisasi DIPA 03

D. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo

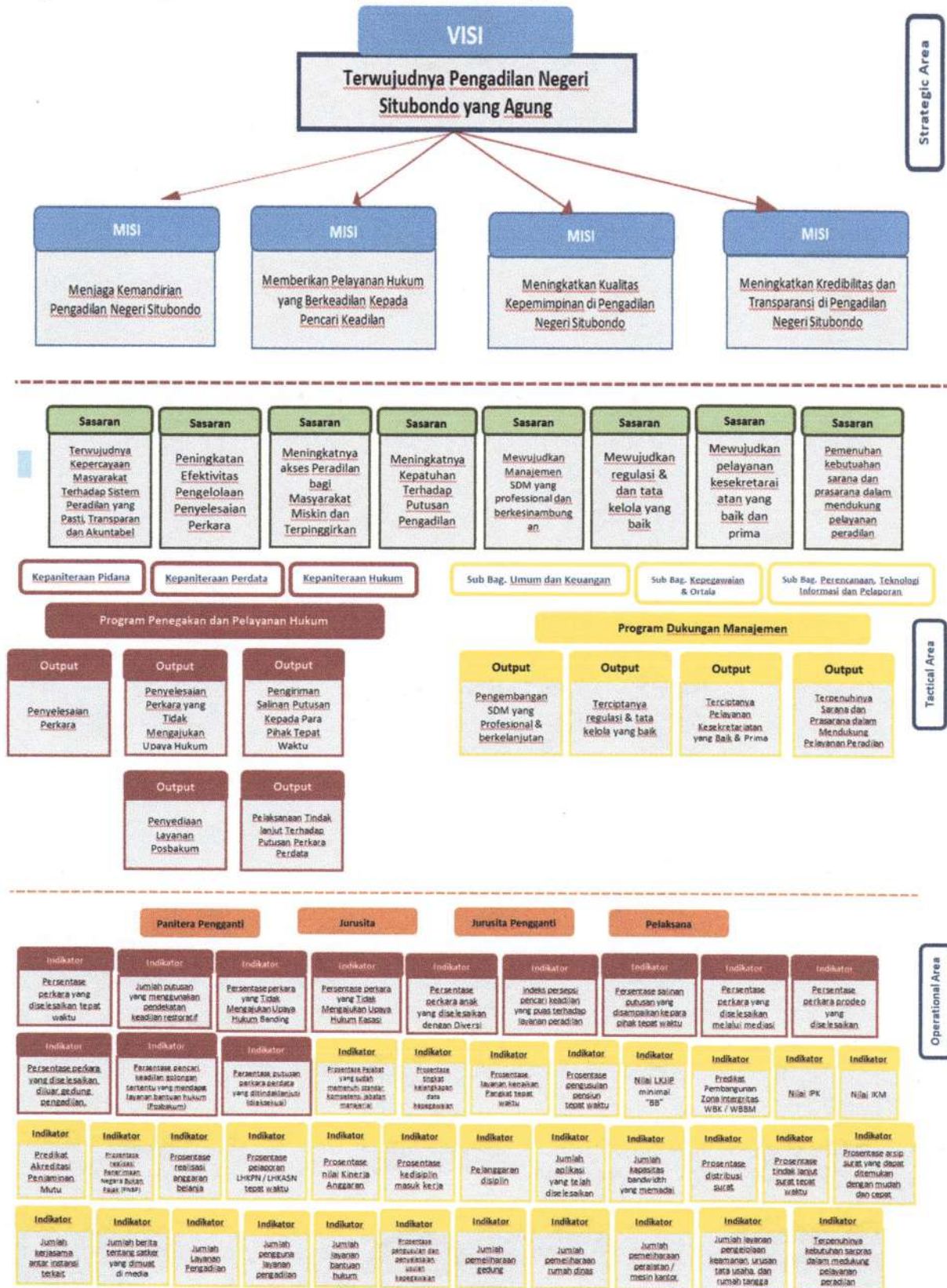
Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan output dan outcome yang diinginkan. Dengan adanya pohon kinerja dapat diketahui analisis proses bisnis yang menggambarkan pola koordinasi antar stakeholders (pemangku kebijakan) yang terlibat dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan penyusunan Pohon Kinerja yang mengacu pada Sasaran Strategis Organisasi. Pohon kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah memuat Tujuan, Visi, Misi dan Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Situbondo yang telah diselaraskan dengan Tujuan, Visi, Misi dan Sasaran Mahkamah Agung RI.

Dalam pohon kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah memuat Sasaran Strategis serta indikator tiap sasaran, juga terdapat strategi yang akan dilaksanakan dalam merealisasikan tiap-tiap sasaran strategis. Dalam pelaksanaan tujuan organisasi tersebut Pengadilan Negeri Situbondo didukung oleh anggaran dalam 2 (dua) DIPA dengan program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.



Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut aparaturnya Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Adapun proses bisnis serta pola koordinasi antar stakeholders Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3: Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Situbondo merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian Kinerja dilihat dari Pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target dengan capaian/ realisasi kinerja selama satu tahun. Pengukuran kinerja ini dilakukan instansi pada setiap berakhir suatu periode.

Hal ini untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target yang telah ditetapkan satu tahun dalam rangka capaian rencana/ sasaran jangka menengah.



A.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Secara keseluruhan target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dari 13 (tiga belas) indikator untuk 4 (empat) sasaran strategis, yang dinyatakan berhasil mencapai target bahkan ada yang melebihi target yang ditetapkan yaitu 13 (tiga belas) indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100 %
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	20 %
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85 %
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %

Tabel 11 : Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir Tahun 2023 di satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo



Dari tabel akan terlihat prosentase capaian kinerja atau keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100 %	100 %	100 %
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	20 %	0 %	0 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%	96%	113 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi :	90%	124,5%	116,8
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10 %	0 %	0 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	98,30 %	105,5%
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	125%	125%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %	0 %	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50 %	100 %	200 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %	100 %	111%
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	97 %	100 %	103 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	97 %	100 %	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola	a. Nilai LKJP Minimal " BB "	75	70	93 %
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	0 %	0 %



	yang baik	c. Nilai IPK	92 %	97,06 %	105 %
		d. Nilai IKM	92 %	98,30 %	104%
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"	"A"	"A"
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %	100 %	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %	102,35 %	104,4 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN/ LHKASN tepat waktu	98 %	100 %	102 %
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	95 %	93,51 %	97,90 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %	100 %	103 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %	0 %	0 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1	1	100 %
		b. Jumlah Kapasitas bandwirth yang memadai	50 Mpbs	100 Mpbs	200 %
		c. Prosestase distribusi surat	100 %	100 %	100 %
		d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	98 %	100 %	102 %
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	98 %	100 %	102%
		f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	3	8	260 %
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	35	81	230 %
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5	6	120%
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Orang	1211 Orang	655 %
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	34 Orang	98 orang	288 %
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	94 %	100 %	106 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/ 1540M2	1/ 1540 M2	100 %
		m. jumlah Pemeliharaan rumah dinas	7 /884 M2	7 / 884 M2	100 %
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	94 Unit	94 Unit	100 %
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan layanan	12 bulan layanan	100 %
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %	80 %	100 %



mendukung Peradilan				
---------------------	--	--	--	--

Tabel 12 : Prosentase capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023

$$\text{Capaian Kirja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut.

Berikut ini penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan dari tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan dari tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

No.	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpulan	Status Warna Pada Aplikasi SIMONEV LAKIP
1.	> 125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100% - 125%	Berhasil	Hijau
3.	75% - 99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30% - 74,99%	Kurang Berhasil	Merah
5.	0% - 29,99%	Tidak Berhasi	Merah

Tabel 13 : Tabel Skala Nilai Ordinal Capaian Kinerja



No	Sasaran	Indikator	Ratat – rata Capaian %	Katagori Keberhasilan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100	Berhasil
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	0	Tidak berhasil
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	113	Berhasil
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	116,8	Berhasil
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0	Tidak berhasil
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	105,5	Berhasil
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	Berhasil
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	125	Berhasil
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0	Berhasil
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0	Berhasil
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	Berhasil
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50	Cukup Berhasil
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	111	Berhasil
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	103	Berhasil
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100	Berhasil
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100	Berhasil
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal " BB "	93	Berhasil
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	0	Tidak Berhasil
		c. Nilai IPK	105	Berhasil



		d. Nilai IKM	103,5	Berhasil
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"	Berhasil
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100	Berhasil
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	104,4	Berhasil
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	102	Berhasil
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	97,90	Cukup Berhasil
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	103	Berhasil
		k. Pelanggaran Disiplin	0	Berhasil
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	100	Berhasil
		b. Jumlah Kapasitas bandwidth yang memadai	200	Sangat Berhasil
		c. Prosestase distribusi surat	100	Berhasil
		d. Prosestase tindaklanjut surat tepat waktu	102	Berhasil
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	102	Berhasil
		f. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	260	Sangat Berhasil
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	230	Sangat Berhasil
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	120	Berhasil
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	655	Sangat Berhasil
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	288	Sangat Berhasil
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	106	Berhasil
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	100	Berhasil
		m. jumlah Pemeliharaan rumah dinas	100	Berhasil
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	100	Berhasil
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	100	Berhasil
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	100	Berhasil



Tabel 14 : Kategori Penilaian Capaian Kinerja Tahun 2023
Pengadilan Negeri Situbondo

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja dari 8 (Delapan) sasaran strategis indikator kinerja di Pengadilan Negeri Situbondo jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tergolong baik dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun hal-hal yang tidak memenuhi target akan dianalisa pada bagian lain dalam Bab ini. Dari hasil persentase capaian seluruh indikator sebanyak 8 (Delapan) indikator dengan kategori berhasil dan 3 (tiga) indikator sangat berhasil berhasil serta 3 (tiga) indikator tidak berhasil berhasil

A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo 2023 merupakan tahun ketiga dalam dokumen Rencana Strategis 2020 – 2024. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo selama periode tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

No	Sasaran	Indikator	2023			2022			2021		
			Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100	100	100	100	100	100	85	93	112
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	20	0	0	20	0	0	10	0	0
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85	96	113	85	95	198,8	85	95	91
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90	124,5	116,8	90	105,1	116,8	81	98,6	104
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10	0	0	10	0	0	0	0	0
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	98,30	105,5	90	92	105,5	80	99,6	124
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	125	125	20	25	125	10%	8%	80%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	85,2	85,2	100	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50	100	200	50	100	200	50	75	150



5	Pengadilan Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90	10	111	90	100	111	90	100	111
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	97	100	103	97	100	103	97	100	103
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	97	100	100	100	100	100	100	100	100
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJP Minimal " BB "	75	70	93	75	77	102	75	70,6	94
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	0	0	WBK	0	0	WBK	0	0
		c. Nilai IPK	92	97,06	105	92	97,06	105	92	97,2	106
		d. Nilai IKM	92	98,30	103,5	92	95,27	103,5	92	95,7	104
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"	"A"
		f. Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98	102,4	104,4	98	102,35	104,4	98	98,18	100,1
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98	100	102	98	100	102	100	100	100
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	95	93,51	97,90	95	93,51	97,90	95	93,51	97,90
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97	100	103	97	100	103	97	100	103
		k. Pelanggaran Disiplin	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		7	Mewujudkan pelayanan sekretariat yang dan prima	c. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1	1	100	1	1	100	1
a. Jumlah Kapasitas bandwicth yang memadai	50 Mpbs			100 Mpbs	200	50 Mpbs	80 Mpbs	160	50 Mpbs	100 Mpbs	200
b. Prosestase distribusi surat	100			100	100	100	100	100	100	100	100
c. Prosestase tindakan surat tepat waktu	98			100	102	98	100	102	98	100	102
d. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	98			100	102	98	100	102	98	100	102
e. Jumlah kerjasama antar Instansi terkait	3			8	260	3	5	166	3	5	166
f. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat dimedia	35			81	230	35	50	142,8	36	81	225
g. Jumlah layanan di Pengadilan	5			6	120	5	6	120	5	6	120
h. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 Org			1211 Org	655	240 Org	339 Org	141	200 Org	76 Org	38
i. Jumlah layanan Bantuan Hukum	34 Org			98 Org	288	34 Org	29 org	85,2	34 Org	96 Org	280
j. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	94			100	106	100	100	100	100	100	100
k. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 M2			1/1540 M2	100	1/1540 M2	1/1540 M2	100	1/1540 M2	1/1540 M2	100
l. Jumlah Pemeliharaan rumah dinas	7/884 M2			7/884 M2	100	7/884 M2	7/884 M2	100	7/884 M2	7/884 M2	100
m. Jumlah Pemeliharaan peralatan /mesin kantor	94 Unit			94 Unit	100	94 Unit	94 Unit	100	94 Unit	94 Unit	100
n. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bln layn	12 bln layn	100	12 bln layn	12 bln layn	100	12 bln layn	12 bln layn	100		
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80	80	100	80	80	100	80	80	100

Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja TH 2021- 2023



Hasil perhitungan capaian kinerja diatas diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa hasil capaian kinerja berupa realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Situbondo jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan beberapa tahun terakhir tergolong baik dan mengalami peningkatan setiap tahun.

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo yang dituangkan dala dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2015 – 2019 telah berakhir pada tahun 2019. Selanjutnya target kinerja Pengadilan Negeri Situbondo yang baru dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah 2020 – 2024. Adapun realisasi dan capaian kinerja yang dicapai oleh Pengadilan Negeri Situbondo selama periode jangka menengah tahun 2015 – 2019 dibandingkan dengan target akhir jangka menengah tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target (2024)	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Ket
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100	100	100	100	Tercapai
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	1	20	0	0	Tidak Tercapai
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86	85	96	112,94	Tercapai
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91	90	124,5	138,33	Tercapai
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10	10	0	0	Tidak Tercapai
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	90	98,30	109,22	Tercapai
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100	100	100	Tercapai



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	125	1.250	Tercapai
		a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1	0	0	0	Tercapai
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1	0	0	0	Tidak Tercapai
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	Tercapai
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50	50	100	200	Tercapai

Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target target akhir jangka menengah tahun 2020 – 2024

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Pengadilan Negeri Situbondo dalam rangka pelaksanaan realisasi kinerja tahun 2023 untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, juga mengacu kepada standar target kinerja dan sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2020 – 2024.

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023 dengan target kinerja pada Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Mari (2023)	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian 2023 (%)	Ket
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:	100	100	100	100	Tercapai
		h. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan keadilan restorative	4	20	0	0	Tidak Tercapai
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	50	85	96	112,94	Tercapai
		j. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50	90	124,5	138,33	Tercapai
		k. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	25	10	0	0	Tidak Tercapai
		l. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	90	98,30	109,22	Tercapai
2	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan	a. Persentase Salinan Putusan Yang	20	100	100	100	Tercapai



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diterima oleh para pihak tepat waktu					
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	10	125	1.250	Tercapai
		a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	30	0	0	0	Tercapai
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100	0	0	0	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	Tercapai
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	75	50	100	200	Tercapai

Tabel 17 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Hasil perhitungan capaian kinerja pada table diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan data pada tabel hasil realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tergolong baik dan dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020 – 2024.

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 2021 nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tergolong Sangat Baik.

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



No	Kode	Kategori	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
			Slur	Kategori	Slur	Kategori	Slur	Kategori	Slur	Kategori	Slur	Kategori	Slur	Kategori	Slur	Kategori	Slur	Kategori
1	0500	080104	72,87	88	83,80	87	83,84	87	83,81	87	83,76	87	83,76	87	83,76	87	83,76	87
2	0500	080105	79,34	88	79,34	88	79,34	88	79,34	88	79,34	88	79,34	88	79,34	88	79,34	88
3	0500	080106	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
4	0500	080107	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
5	0500	080108	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
6	0500	080109	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
7	0500	080110	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
8	0500	080111	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
9	0500	080112	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
10	0500	080113	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
11	0500	080114	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
12	0500	080115	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
13	0500	080116	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
14	0500	080117	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
15	0500	080118	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
16	0500	080119	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
17	0500	080120	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
18	0500	080121	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
19	0500	080122	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
20	0500	080123	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
21	0500	080124	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
22	0500	080125	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
23	0500	080126	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
24	0500	080127	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
25	0500	080128	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
26	0500	080129	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
27	0500	080130	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
28	0500	080131	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
29	0500	080132	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
30	0500	080133	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
31	0500	080134	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
32	0500	080135	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
33	0500	080136	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
34	0500	080137	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
35	0500	080138	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
36	0500	080139	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
37	0500	080140	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
38	0500	080141	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
39	0500	080142	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
40	0500	080143	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
41	0500	080144	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
42	0500	080145	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
43	0500	080146	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
44	0500	080147	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
45	0500	080148	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
46	0500	080149	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88
47	0500	080150	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88	83,84	88

Gambar 4 Rekapitulasi Nilai AKIP Pengadilan Negeri Situbondo Di Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya Tahun 2016-2021

KOMIDANAS MA-RI

Komandan dan Wakil Komandan Pengadilan

• Utama
• Koordinator
• Urutan
• Perencanaan
• Keuangan
• Berita

E-SAKIP : NILAI AKIP TAHUN 2017 - 2022

Monitoring nilai AKIP per tahun

AA-A Memuaskan / Sangat Memuaskan
BB-B Baik/Sangat Baik
CC-C Cukup
DD-D Kurang
EE-Es Not other data ada mas!

Tampilkan tahun 2023

Sektor/Wilayah
Tahun 2022
Tahun 2021
Tahun 2020
Tahun 2019
Tahun 2018
Tahun 2017

BB
BB
BB
BB
BB
BB

1. Pengadilan Negeri Situbondo

Jawa Timur

Gambar 5 Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E-Sakip Komdanas



3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar **70,6** atau **BB (Sangat Baik)**.
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Gambar 6 : Nilai AKIP Tahun 2022 Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023, Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun yang berikutnya. Adapun analisis capai kinerja Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2023 sesuai sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Pengadilan Negeri merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung antara lain mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Dimana masyarakat pencari keadilan menaruh harapan akan terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan



Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 09 / SK.KPN./1 / 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Situbondo , sasaran strategis ini diukur melalui 8 (Delapan) indikator kinerja utama sebagai berikut.

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Memberikan aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat pencari keadilan ;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Mewujudkan manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan;
6. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
7. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang baik dan prima;
8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Adapun realisasi dan capaian target Kinerja Strategis 1 : Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran tersebut mempunyai 6 (Enam) indikator kinerja diantaranya :

N o	Indikator Kinerja	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100
2	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	20	0	0
3	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85	96	113
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	90	124,5	138,3
5	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10	0	0
6	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	98,30	109,2
RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				76,75

Tabel 18 : Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2023

Hasil perhitungan capaian kinerja pada tabel diatas diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu



- Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Untuk perkara perdata dari 208 jumlah perkara yang diselesaikan, 192 perkara diselesaikan tepat waktu, jadi persentase relaisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk perkara pidana, dari 206 jumlah perkara yang diselesaikan , 191 perkara diselesaikan tapat waktu, jadi persentase realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%, sesuai target yangtelah ditetapkan Capaian kinerja digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 19 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselsaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2023	Perdata	192	192	100%	100%	100%
	Pidana	191	191	100%	100%	100%
2022	Perdata	218	218	100%	100%	100%
	Pidana	181	181	100%	100%	100%



2021	Perdata	162	161	100%	100%	100%
	Pidana	175	175	100%	100%	100%

Tabel 20 : Perbandingan capaian kinerja tepat waktu

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai berikut :

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2023 mencapai 100 %. Perhitungan indikator kinerja penyelesaian perkara tepat waktu dihitung sejak mediasi gagal atau semenjak gugatan dibacakan. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi khususnya pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) serta pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah Agung mengenai penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding . Pada tahun 2022 semua perkara baik pidana maupun perdata diselesaikan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Situbondo berjalan dengan baik.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Situbondo yaitu diantaranya :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses percepatan penyelesaian perkara , sejak perkara masuk hingga putus melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara lewat WA grub setiap pagi oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo
3. Dalam pelaksanaan rapat pembinaan dan pengawasan dan rapat-rapat insidentil, Ketua Pengadilan Negeri Situbondo selalu menghimbau kepada seluruh hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang-undang yang berlaku.
4. Penerapan SOP penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah 5 (lima) bulan.



Hasil kinerja Pengadilan Negeri Situbondo telah terbukti sangat baik dan pada tahun 2023 ini mendapatkan penghargaan berupa :



Gambar 7.
Piagam Penghargaan (EIS) Evaluasi Implementasi SIIP dari Pengadilan Tinggi Surabaya, Peringkat Ke- 1 Bulan Januari – Oktober 2023 Pengadilan Kelas I B Kategori 1 s/d 500 perkara

2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

- Indikator persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung dihitung dari perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif.
- Penerapan Restoratif justice di lingkungan Mahkamah Agung diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice .
- Perkara yang diajukan untuk restorative justice adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Situbondo tidak terdapat perkara yang diajukan melalui pendekatan restorative justice, jadi realisasi persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah 0%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian
-------------------	--------	-----------	--------------------



			Kinerja
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	20%	0%	0%

Tabel 21 : Persentase capaian Kinerja putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative

Penerapan Restoratif justice di Pengadilan belum ada petunjuk lebih lanjut dari Mahkamah Agung terkait penerapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman Penerapan Restoratif Justice.

3. **Prosentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,**
- Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
 - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
 - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Untuk perkara perdata 194 perkara yang diputus 11 perkara menyatakan banding, jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 183 perkara. Target pada indikator ini adalah 85%, sedangkan realisasinya adalah 95 %,

Untuk perkara pidana 127 perkara Pidana yang putus, 26 perkara menyatakan banding, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 101 perkara. Target pada indikator ini adalah 85%, sedangkan realisasinya adalah 80 %,

Pada tahun 2023 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 321 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 310. Target pada indikator ini adalah 85%, sedangkan realisasinya adalah 97%, sehingga capaian indikator persentase



perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 114 %
Capaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	85%	97%	114 %,

Tabel 22: Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2023

Perbandingan target realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 3 tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
2023	321	310	85 %	97 %	114 %
2022	382	351	85%	108,8 %,	120,8 %
2021	353	351	80%	92,7%,	115,8 %

Tabel 23: Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Dari table diatas bisa dilihat bahwa rata - rata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan atau diatas 100 % Jika dilihat jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding angkanya yang kecil, jika dibandingkan dengan perkara yang putus berarti masyarakat menunjukkan apresiasi yang baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

- Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dihitung dari perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.



- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Untuk perkara perdata 194 perkara yang diputus 4 perkara menyatakan Kasasi, jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 190 perkara. Target pada indikator ini adalah 75%, sedangkan realisasinya adalah 98 %,

Untuk perkara pidana 127 perkara yang putus 0 perkara menyatakan Kasasi, jadi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 127 perkara. Target pada indikator ini adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 100 %, Pada tahun 2023 jumlah perkara yang putus, baik pidana dan perdata adalah 321 perkara, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 317.

Target pada indikator ini adalah 90%, sedangkan realisasinya adalah 99 %, sehingga capaian indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 101%,. Capaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90 %	99 %,	101%

Tabel 24 : Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2023

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 3 tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Perkara Yang diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
2023	321	317	90 %	99 %	101 %
2022	382	363	90 %	105,14%	116,8 %
2021	353	340	91 %	95,7%,	105,1 %

Tabel 25: Prosentase capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi



Dari table diatas bisa dilihat bahwa rata - rata persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan atau diatas 100 %, Jika dilihat jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sangat kecil, jika dibandingkan dengan perkara yang putus masyarakat menunjukkan apresiasi yang baik terhadap Pengadilan Negeri Situbondo.

5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

- Indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi.
- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Penanganan diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Tahun 2023, perkara pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Situbondo, sebanyak 3 perkara. Dari 3 perkara pidana anak tersebut, tidak dapat diajukan diversi dan belum tercapai perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi di Pengadilan Negeri Situbondo, dan perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi, Target yang hendak dicapai adalah 10% dan kemudian belum ada penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi, Capaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Prosentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	0%,	0%

Tabel 26: Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi



Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi 3 tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara diversifikasi	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
2023	3	0	10%	0%,	0%,
2022	2	0	10%	0%,	0%,
2021	3	0	10%	0%,	0%,

Tabel 27: Prosentase Capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi capaian kinerjanya belum tercapai , namun apabila dilihat dari jumlah perkara anak yang masuk kecil dan belum tercapai diselesaikan dengan diversifikasi, hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

1. Penyelesaian perkara diversifikasi telah dilaksanakan di tingkat penyidikan maupun penuntutan.
2. Perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Situbondo tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi.

Syarat Diversifikasi pada Pasal 7 UU SPPA:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
2. Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk penyelesaian perkara dengan diversifikasi adalah sebagai berikut :

1. Hakim perkara anak pada Pengadilan Negeri Situbondo mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk dapat diselesaikan melalui diversifikasi.
2. Koordinasi dengan instansi terkait seperti Bapas dan Lembaga perlindungan anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversifikasi.



6. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

- Indikator Kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan perhitungannya disesuaikan dengan PERMENPAN No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi internal harus > 80.

Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Periode	Jumlah Responden	Hasil Survei	Keterangan
1	Triwulan I (Januari – Maret)	42	94,84 %	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
2	Triwulan II (April – Juni)	32	93,66 %	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
3	Triwulan III (Juli – September)	54	98,30 %	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
4	Triwulan IV (Oktober- Desember)	63	95,90 %	Hasil survei melalui aplikasi e-survey Badilum
Total		191	95,68%	

Tabel 28 : Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2023 adalah 90%, seangkan realisasinya adalah 95,68% sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 106,3%,

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan periode tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	90%	95,68%,	106,3 %
2022	90%	95,27%,	105,5%
2021	90%	89,57%,	99,5%

Tabel 29: Perbandingan Capaian Kinerja Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan



Table diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya persentase indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan peradilan maupun pelayanan PTSP diantaranya:

1. Petugas PTSP mengikuti pelatihan tentang pelayanan prima, bekerjasama dengan Bank BRI cabang Situbondo .
2. Tersedianya pojok e-court untuk melayani pihak yang berperkara melalui E-court
3. Tersedianya mesin EDC pada kasir untuk pembayaran perkara perdata dan PNPB
4. Menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) tentang waktu layanan dan jenis layanan di Pengadilan Negeri Situbondo
5. Ada kompensasi pelayanan bagi pengguna pengadilan apabila layanan yang diberikan pada PTSP + tidak memenuhi SOP yang telah ditetapkan.
6. Adanya sarana dan prasarana penyandang difabel.
7. Tersedianya ruang tunggu PTSP yang nyaman bagi pengunjung.
8. Tersedianya ruang tamu terbuka yang nyaman bagi tamu

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mengetahui capaian tingkat efektifitas pengelolaan perkara terdapat 2 (Dua) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase Salinan Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	125 %	125 %
RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				112,5%

Tabel 30 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 2



1. Persentase salinan Putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

- Indikator kinerja persentase salinan putusan yang sampaikan kepada pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian untuk salinan atas perkara pidana, Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2011 yaitu paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Tahun 2023 terdapat 181 perkara pidana dan 194 perkara perdata yang putus, salinan putusannya semuanya telah dikirimkan tepat waktu, sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 100%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Dari jumlah berkas perkara yang putus baik perkara Perdata 194 dan pidana 127 Total 321 berkas, salinan putusan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu , Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%, Capaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 30 : Prosentase Capaian salinan putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu	Jumlah Putusan	Target	Realisasi	Capaian
2023	Perdata	192	192	100%	100%	100%



	Pidana	127	127	100%	100%	100%
2022	Perdata	218	218	100%	100%	100%
	Pidana	181	181	100%	100%	100%
2021	Perdata	162	161	100%	100%	100%
	Pidana	175	175	100%	100%	100%

Tabel 31 : Perbandingan Capaian Prosentase salinan putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2023, persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu mencapai target 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri Situbondo dalam pengiriman salinan putusan tidak dapat diragukan lagi. Semua ini tidak terlepas dari upaya Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu meningkatkan kredibilitasnya dalam hal penyampaian salinan putusan dan upaya yang dilakukan diantaranya adalah penyampaian atau pengiriman salinan putusan kepada terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui kurir sehingga segera terkirim, selain itu salinan putusan untuk perkara perdata maupun pidana dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti dengan sistem bergilir sehingga pembagian pengiriman salinan putusan oleh Jurusita / Jurusita pengganti dilaksanakan secara adil.

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Prosedur mediasi di Pengadilan mengacu pada Perma nomor 1 Tahun 2016.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tahun 2023 ada 47 perkara perdata yang di lakukan mediasi 5 perkara diantaranya berhasil, sehingga realisasi pada indikator ini adalah 106%.



Target untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebesar 10 %, sedangkan realisasinya adalah sebesar 106 %, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 882 %.

Capaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	106 %	882 %

Tabel 32 : Persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini periode 2021 – 2023 dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Yang di lakukan mediasi	Jumlah Perkara Yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2023	47	5	10%	106%	882 %
2022	83	5	20%	60%	300%
2021	45	4	10%	8%	80%

Tabel 33 : Perbandingan Capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan

untuk mengetahui capaian Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terdapat 3 (tiga) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara Prodeo yang diselsaikan	0 %	0 %	0 %
2	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %	0 %	0 %



3.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100%	100 %
RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				33,3%

Tabel 34 : Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 3

1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan

- Indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.
- Penyelesaian perkara secara prodeo diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

Tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Situbondo, sehingga persentase realisasi pada indikator ini adalah 0%.

Capaian target digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%

Tabel 35 : Persentase Capaian perkara prodeo yang diselesaikan

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 0 %, berbanding lurus dengan capaian pada 3 tahun sebelumnya, dimana target untuk penyelesaian perkara prodeo tidak dapat direalisasikan karena pada tahun 2023, tidak ada perkara prodeo yang masuk.

Adapun perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	0%	0%	0%



2021	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%

Tabel 36 : Perbandingan capaian Kinerja perkara prodeo yang diselesaikan

2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

- Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.
- Penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Berdasarkan SE Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 202 tentang pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, Sidang diluar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana, seperti, permohonan ganti nama, ijin menikah, anak angkat, akta kelahiran terlambat, perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, tidak terdapat perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, jadi untuk realisasi tahun ini adalah 0%.

Dengan demikian capaian indikator ini dapat tercapai / terlaksana, Capaian target digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase perkara yg diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	0%	0%

Tabel 37 : Persentase Capaian perkara perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :



Tahun	Jumlah Perkara Yang diajukan diselesaikan diluar gedung	Jumlah Perkara Yang diselesaikan diluar gedung	Target	Realisasi	Capaian
2023	0	0	0%	0%	0%
2022	0	0	0%	0%	0%
2021	0	0	0%	0%	0%

Tabel 38 : Perbandingan Capaian Kinerja perkara yang diselesaikan Diluar gedung pengadilan

3. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat yang mendapat bantuan hukum (Posbakum) .

- Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah Permohonan layanan hukum
- Pelaksanaan Posbakum di pengadilan diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

Tahun 2023 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah 96 orang, sedangkan jumlah permohonan layanan hukum yang diajukan pada posbakum adalah 96 orang, sehingga realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Berikut ini adalah laporan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Situbondo :

yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)

No.	Bulan	Jumlah
1	Januari	4 Orang
2	Pebruari	10 Orang
3	Maret	4 Orang
4	April	6 Orang
5	Mei	7 Orang



6	Juni	7 Orang
7	Juli	7 Orang
8	Agustus	6 Orang
9	September	7 Orang
10	Oktober	11 Orang
11	Nopember	8 Orang
12	Desember	19 Orang
Jumlah Total		96 Orang

Tabel 39 : Rekapitulasi Jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum di targetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel 40 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Permohonan layanan Hukum	Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2022	96	96	100 %	100 %	100 %
2021	30	30	100 %	100 %	100 %
2022	30	30	100 %	100 %	100 %

Tabel 41 : Perbandingan Capaian Kinerja pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum (Posbakum)

Dari table diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan golongan tertentu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum.



Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo dalam memberikan pelayanan terbaik yaitu diantaranya, Pengadilan Negeri Situbondo telah menanda tangani MOU dengan lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN dan memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang mampu dan sosialisasi adanya layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Situbondo melalui website.

SASARAN STRATEGIS 4 :
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan

Untuk mengetahui capaian tingkat Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan terdapat 1 (satu) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut ada

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	50%	25%	50%
RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				50%

Tabel 42 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi).

- Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun 2023.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$$



Tahun 2023 terdapat 8 perkara permohonan eksekusi yang diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo , dan 2 perkara telah selesai di tindak lanjuti, jadi realisasi pada indikator ini adalah 25 %.

Target pada indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah sebesar 50%, sedangkan realisasinya adalah 50 %, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %. dapat dilihat dari data berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	50%	25 %	50 %

Tabel 43 : Persentase Capaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)

Dengan melihat tercapainya target kinerja pada indikator ini menandakan masyarakat pencari keadilan telah puas dengan putusan pengadilan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan	Jumlah permohonan Eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
2023	2	8	50%	25%	50%
2022	18	18	50%	100%	200%
2021	12	10	50%	83,3%	166,6%

Tabel 44 : Perbandingan capaian Kinerja putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)

SASARAN STRATEGIS 5 :

Mewujudkan Manajemen SDM yang Profesional dan berkesinambungan

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan terdapat 4 (empat) indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut adalah:



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial	90%	100%	111%
2	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	97%	100%	103%
3	Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%
4	Persentase pengsulan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%
RATA – RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				103,5%

Tabel 45 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 5

1. **Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial ,**
 - Indikator Kinerja Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi standart kompetensi jabatan manajerial adalah perbandingan antara jumlah pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial dengan jumlah pemangku jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo.
 - Standart kompetensi jabatan manajerial dilihat dari pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh personil yang telah menduduki jabatan manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo
 - Jabatan Manajerial di Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Panitera.
 - d. Sekretaris.
 - e. Panitera Muda Pidana.
 - f. Panitera Muda Perdata.
 - g. Panitera Muda Hukum .
 - h. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana.



j. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dengan perhitungan sebagai berikut

Jumlah Pejabat Yang Telah Memenuhi Standart Kompetensi Jabatan Manajerial

x 100%

Jumlah Pemangku Jabatan

Tahun 2023, jumlah Jabatan Manajerial yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo berjumlah 10 orang, sedangkan yang telah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial adalah 10 orang, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Berikut data Pejabat Struktural di Pengadilan Negeri Situbondo yang telah mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan standart kompetensi jabatan yang dimiliki:

No	Nama	Jabatan	Diklat Manajerial Yang Pernah diikuti	Tahun Pelaksanaan Diklat
1	2	4	5	6
1.	Achmad Rasjid, SH	Ketua	Intektual (HKI) Hakim Peradilan Umum	2021
2.	Putu Endru Sonata, SH. MH.	Wakil Ketua	Pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor	2021
3.	Rifkie, SH.MH.	Panitera	Integrated Risk Managemen	2020
4.	Sutoto Wninaro, SH	Sekretaris	Diklat Pim IV	2015
5.	Haryono, SH	Panmud Perdata	Bimtek Panitera Pengganti	2010
6.	Ferry Irawan , SH	Panitera Pengganti	Bimtek Panitera Pengganti	2019
7.	Abd. Mukti , SH	Panmud Hukum	Bimtek Panitera Pengganti	2021
8.	Iwan Mulyono, SH	Kasubag. Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2020
9.	Annang Mardiyanto, SH	Kasubag. Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana	Bimtek Perencanaan dan Kepegawaian	2022
10	Intan Mustika Atmaningrum, SH	Kasubag. Umum Dan Keuangan	Bimtek Keuangan dan BMN	2022



Tabel 46 : Pejabat Yang Telah Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Standart Kompetensi Jabatan Manajerial

Dengan demikian capaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini , dapat dilihat dari data berikut :

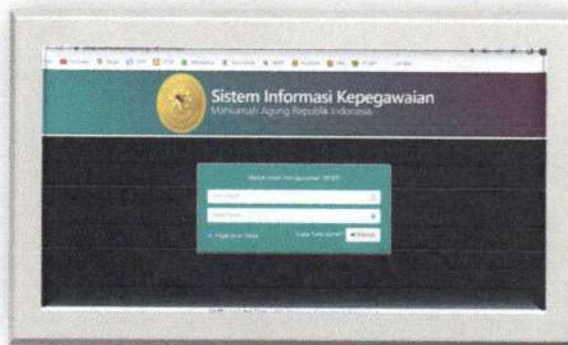
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90%	100%	111%

Tabel 47 : Persentase pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial

Persentase pejabat yang sudah memenuhi standart kompetensi jabatan manajerial di targetkan 90 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 111 %, sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian

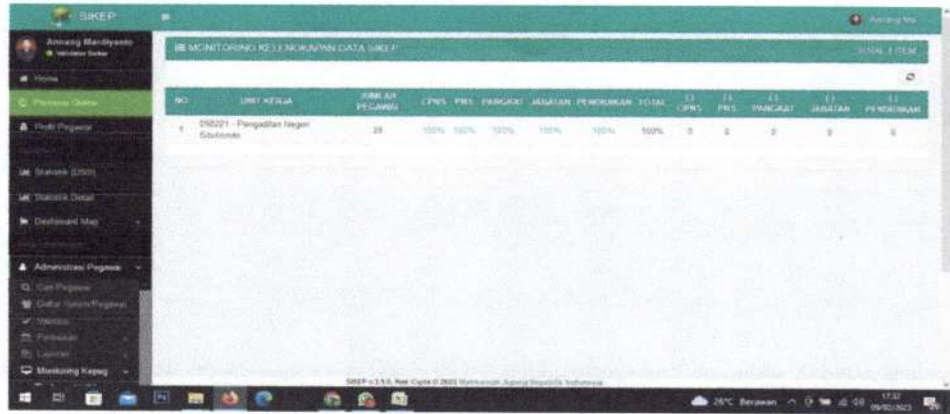
- Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP. Aplikasi ini dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).
- Indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawain dapat dilihat pada aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Situbondo dengan alamat website sikep.mahkamahagung.go.id



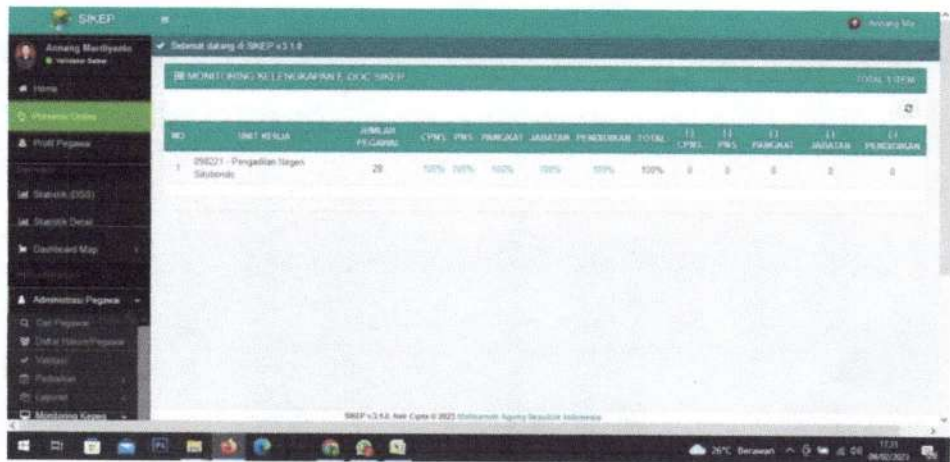
Gambar 8 : Aplkasi SIKEP



Apabila dilihat dari monitoring kepegawaian dari aplikasi SIKEP tahun 2023, baik pada monitoring kelengkapan data maupun kelengkapan e-doc, kelengkapan data SIKEP Pengadilan Negeri Situbondo menunjukkan angka 100%, dengan demikian, realisasi pada indikator ini tercapai yaitu sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan



Gambar 9 : Monitoring Kelengkapan data SIKEP



Gambar 10 : Monitoring Kelengkapan E – DOC SIKEP

Capaian Kinerja pada indikator persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat dari data berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian	100%	100%	100%

Tabel 48 : Persentase Persentase Tingkat Kelengkapan Data Kepegawaian

Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian ditargetkan 100%, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian



kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat kelengkapan data kepegawaian di Pengadilan Negeri Situbondo telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Persentase Layanan Kenaikan Pangkat tepat waktu

- Indikator Kinerja persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai yang mendapat hak kenaikan pangkat pada tahun 2022 dengan pegawai yang mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu.
- Pengusulan kenaikan pangkat (KP) pegawai dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum TMT kenaikan pangkat pegawai yang bersangkutan. Kenaikan Pangkat pegawai terjadi pada 2 (dua) periode terhitung pada bulan April dan Oktober. Apabila TMT kenaikan pangkat jatuh pada bulan April, maka pengusulan Kenaikan Pangkatnya dilakukan pada bulan Oktober tahun sebelumnya dan begitu pula apabila pegawai yang Kenaikan Pangkatnya jatuh pada bulan Oktober, diusulkan pada bulan April tahun yang sama.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Kenaikan Pangkat tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang naik Pangkat}} \times 100\%$$

Tahun 2023, jumlah pegawai yang naik pangkat sebanyak 4 (Empat) orang pegawai dengan data sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Shofil Setyarini, S.Sos	Aparatus Analis SDM	TMT 1 April 2023
2.	I Gede Karang Anggayasa, SH.MH..	Jurusita Pengganti	TMT 1 April 2023
3.	Anak Agung Putra Wiratjaya, SH.MH.	Jurusita Pengganti	TMT 1 April 2023
4	Gunung Rikayat	Jurusita Pengganti	TMT 1 Oktober 2023

Tabel 49 : Data Pegawai Yang Naik Pangkat Tahun 2023



Capaian Kinerja pada indikator persentase Layanan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 50 : Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu

Dari 4 (Empat) pegawai yang naik pangkat pada tahun 2023, semuanya telah mendapatkan layanan kenaikan pangkat tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu ditargetkan 100%, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat	Jumlah Layanan kenaikan pangkat Tepat Waktu	Realisasi
2023	4	4	100%
2022	3	3	100%
2021	1	1	100%

Tabel 51 : Perbandingan capaian layanan kenaikan pangkat tepat waktu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua kenaikan pangkat diproses secara tepat waktu oleh Sub Bagain Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Situbondo melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) dan tidak ada keterlambatan dalam layanan kenaikan pangkat pegawai.

4. Persentase Pengusulan Pensiun tepat waktu

- Indikator Kinerja persentase layanan pengusulan pensiun tepat waktu dapat diukur dari perbandingan antara jumlah pegawai



pegawai yang pensiun pada tahun 2023 dengan pegawai yang mendapatkan layanan pengusulan pensiun tepat waktu.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pengusulan Pensiun Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Pensiun}} \times 100\%$$

Daftar nama pegawai yang pensiun pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	Sri Tutik Haerani	Jurusita Pengganti	1 Januari 2023
2	Abd Razak Subhan	Jurusita Pengganti	1 Januari 2023
3	Budiarso	Jurusita	1 Pebruari 2023
4	Soelistinah	Jurusita Pengganti	1 Nopember 2023

Tabel 52 : Daftar Nama Pegawai Yang Pensiun Tahun 2023

Capaian Kinerja pada indikator persentase pengusulan pensiun tepat waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase Pengusulan Pensiun tepat waktu	100%	100%	100%

Tabel 53 : Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Tahun 2023

Dari 4 (dua) pegawai yang pensiun pada tahun 2023, semuanya telah diusulkan tepat waktu, jadi realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Persentase pengusulan pensiun tepat waktu ditargetkan 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, maka, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100 %. Perbandingan Jumlah pegawai yang diusulkan pensiun tepat waktu tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Pensiun	Jumlah Usulan Pensiun Tepat Waktu	Realisasi
2023	4	4	100%
2022	2	2	100%



2021	1	1	100%
------	---	---	------

Tabel 54 : Perbandingan Persentase Pengusulan Pensiun Tepat Waktu Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa semua pegawai yang akan pensiun diusulkan secara tepat waktu dan tidak ada keterlambatan dalam pengusulan pensiun. Pengusulan pensiun pegawai dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum TMT pensiun pegawai yang bersangkutan.

SASARAN STRATEGIS 6 :
Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang baik

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Yang Baik terdapat 11 (Sebelas) indikator untuk mengukurnya Indikator tersebut adalah:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6
1	Nilai LKJP Minamal " BB "	75	70,6	94,1 %
2	Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK/ WBBM	WBK	Belum	0 %
3	Nilai IPK	92%	97,2 %	105,65 %
4	Nilai IKM	92%	95,7%	104 %
5	Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"	"A"	100 %
6	Prosestase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %	100 %	100 %
7	Prosestase realisasi anggaran belanja	95 %	95,51 %	100,1 %
8	Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98 %	100 %	102 %
9	Prosestase nilai kinerja anggaran	95 %	93,51 %	97,90 %
10	Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %	100 %	103 %
11	Pelanggaran Disiplin	1 %	0%	0%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				112,85 %

Tabel 55 : Capaian Target Kenerja Sasaran Strategis 6



1. Nilai LKJIP Minimal “ BB “

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan Negeri Situbondo telah
- melaksanakan penilaian mandiri terhadap laporan SAKIP dan kemudian dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk dilakukan evaluasi.
- Hasil dari Evaluasi SAKIP Pengadilan Tinggi Surabaya, tahun 2022, Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan nilai 70 (BB), dapat dilihat dari data berikut



Gambar 11 Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan E- Sakip Komdanas

3. Pengadilan Negeri Situbondo memperoleh nilai sebesar 70,6 atau BB (Sangat Baik).
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24



• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Gambar 12 Rekapitulasi Nilai AKIP Berdasarkan Surat KPT Surabaya



Situbondo 77,00, Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu berusaha mempertahankan dan mengembangkan personil yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikut sertakan dalam pelatihan atau diklat akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh tingkat banding maupun Mahkamah Agung

2. Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

- Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Pengadilan Negeri Situbondo mencanangkan Zona Integritas sejak tahun 2019
- Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Tahun 2023 capaian indikator ini dan Target pada indikator kinerja Pengadilan Negeri Situbondo dapat meraih WBK, namun realisasinya Pengadilan Negeri Situbondo belum bisa meraih WBK, sehingga persentase capaian kinerja pada indikator ini , dapat dilihat dari data berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM	WBK	0%	0%

Tabel 58 : Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM

Target pada indikator kinerja ini adalah pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Situbondo dapat meraih WBK, namun realisasinya Pengadilan Negeri Situbondo belum bisa meraih WBK, sehingga persentase capaian kinerja pada indikator ini adalah 0%.

Keterangan	Tahun		
	2020	2021	2022
Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM	0%	0%	0%
Persentase	0%	0%	0%

Tabel 59 : Perbandingan Persentase Predikat Pembangunan Zona Integritas WBK / WBBM



Gambar 14. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019

3. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

- adalah indeks pengukuran tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi.
- Dalam hal ini Dirjen Badan Peradilan Umum telah membuat inovasi e-survey sebagai tolak ukur Indeks persepsi anti korupsi dengan menggunakan aplikasi e-Survey Badilum dengan alamat website.esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id.

Ada 10 (sepuluh) Indikator untuk mengukur dimaksud :

1. Manipulasi peraturan.
2. Penyalahgunaan jabatan.
3. Menjual Pengaruh.
4. Transparansi biaya.
5. Transaksi rahasia.



6. Biaya Tambahan.
7. Hadiah.
8. Transparansi pembayaran.
9. Percaloan.
10. Perbuatan curang

Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum (**SI SUPER**), **Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)** Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jangka Waktu	Jumlah Responde	Indeks IPK
Triwulan I (Januari – Maret)	42 Responden	3,85 / 96,19 %
Triwulan II(April – Juni)	32 Responden	3,88 / 97,11 %
Triwulan III(Juli – September)	55 Responden	3,94 / 98,50%
Triwulan IV (Oktober– Desember)	64 Responden	3,88 / 97,11%
Nilai Rata – rata	193 Responden	3,89 / 97,2 %

Tabel 60 : Persentase capaian Nilai IPK



Gambar 15. Nilai IPK Terwulan I Si Super



Gambar 16. Nilai IPK Terwulan II Si Super



Gambar 17 Nilai IPK Terwulan III Si Super



Gambar 18 Nilai IPK Terwulan IV Si Super

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada Tahun 2023, dengan demikian $97,2 / 92 \times 100\% = 106\%$. Dengan demikian capaian indikator ini sudah memenuhi target.



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	92%	97,2%	106%

Tabel 61 : Persentase capaian Nilai IPK

Target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja Nilai IPK adalah 92%, sedangkan realisasinya adalah 97,2%, jadi persentase capaian kinerja untuk indikator nilai IPK telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 106%.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini tiga tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

No	Tahun	Nilai IPK
1	2023	106%
2	2022	105%
3	2021	95,87 %

Tabel 62 : Perbandingan Persentase capaian Nilai IPK

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, nilai indeks persepsi anti korupsi Pengadilan Negeri Situbondo meningkat, hal ini berarti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku anti korupsi pegawai Pengadilan Negeri Situbondo juga semakin tinggi dan Pengadilan Negeri Situbondo masuk dalam Kategori Bersih dari korupsi.

4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sekarang menjadi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun Ruang lingkup pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat yaitu:

1. Persyaratan.
2. Prosedur.
3. Waktu Pelayanan.
4. Biaya/Tarif.



5. Produk Spesifikasi Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana.
7. Perilaku Pelaksana.
8. Sarana dan Prasarana.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Berdasarkan hasil dari aplikasi e-survey Badilum (SI SUPER), Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jangka Waktu	Jumlah Responde	Indeks IPK
Triwulan I (Januari – Maret)	42 Responden	3,79 / 94,84%
Triwulan II(April – Juni)	32 Responden	3,75 / 93,66%
Triwulan III(Juli – September)	54 Responden	3,93 / 98,30%
Triwulan IV (Oktober– Desem)	63 Responden	3,84 / 95,90%
Nilai Rata – rata	191 Responden	3,83 / 95,7 %

Tabel 63: HASIL IKM e –Survey Badilum Tahun 2023



Gambar 19 Nilai SKM Terwulan I Si Super



Gambar 20. Nilai SKM Terwulan II Si Super



Gambar 21. Nilai SKM Terwulan III Si Super



Gambar 22. Nilai SKM Terwulan IV Si Super

Prosentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada Tahun 2023, dengan demikian $95,7 / 92 \times 100\% = 104\%$. Dengan demikian capaian indikator ini sudah memenuhi target.



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92%	95, 7%	104 %

Tabel 64 : Persentase capaian Nilai IKM

Target untuk indikator indeks kepuasan pencari keadilan tahun 2023 adalah 92%, seangkan realisasinya adalah 97,27% sehingga Capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 103,5 %

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tahun	Nilai IKM
2023	104 %
2022	100,8%
2021	89,8%

Tabel 65 : Perbandingan Persentase capaian Nilai IKM

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 nilai indeks kepuasan msasyarakat pada Pengadilan Negeri Situbondo semakin meningkat, hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna peradilan serta berusaha melengkapi sarana dan prasarana demi menunjang kenyamanan masyarakat pengguna peradilan.

5. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

- Suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilum untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- Pengadilan Negeri Situbondo pertama kali melaksanakan akreditasi penjaminan mutu pada pada tahun 2017 mendapatkan predikat A excellent



Capaian Kinerja Indikator Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	A	"A"	100%

Tabel 66: Prosentase Capaian Kinerja Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah Pengadilan Negeri Situbondo adalah mendapatkan predikat A Excellent untuk penilaian APM.

- Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Situbondo meraih predikat A excellent dengan jumlah nilai 738 berdasarkan SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 2476/DJU/SK/OT.01.3/12/2022, tanggal 9 Desember 2022, sehingga persentase capaian kinerja pada tahun 2022 untuk indikator ini adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



Gambar 23 : Sertifikat Predikat APM tahun 2022

- Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Situbondo meraih predikat A excellent dengan namun sampai saat ini belum ada data informasi yang pasti maupun data dukung dimaksud, tetapi persentase capaian kinerja pada tahun 2023 untuk indikator ini adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Pada bulan Oktober 2023 TIM Surveilence dari Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan Evaluasi dan Monitoring APM di Pengadilan Negeri Situbondo



Gambar 24 : Assesment Survelence Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu APM	"A"	"A"	"A"
Persentase	100%	100%	100%

Tabel 67 : Persentase Perbandingan capaian Predikat (APM)

6. **Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).**
 - Indikator kinerja ini mengukur perbandingan antara jumlah PNBP yang diterima dengan PNBP yang disetor ke kas Negara.



Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah PNBP yang disetor ke kas negara}}{\text{Jumlah PNBP yang diterima}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Capaian Kinerja
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	100%	100%	100%

Tabel 68 : Prosentase Capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada tahun 2023, jumlah PNBP yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo dari DIPA 01 adalah Rp. 3.464.783,- didapat dari sewa lahan untuk kantin dan rumah dinas, sedangkan untuk DIPA 03 adalah Rp. 40.945.500,- didapat dari pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya, pendapatan leges dan pengesahan dan pendaftaran surat dibawah tangan.

Dari jumlah PNBP baik DIPA 01 dan 03 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo, semua disetor ke kas Negara, jadi realisasi pada indikator ini adalah 100%.

Target yang telah ditetapkan adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada untuk indikator ini adalah 100%.

Berikut adalah data penerimaan PNBP Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021-2023

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini 3 tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

No.	Tahun	PNBP Yang Diterima (Rp.)	PNBP Yang Disetor (Rp.)	Realisasi
1	2023			
	01	3.464.783	3.464.783.	100%
	03	40.945.500	40.945.500	100%
2	2022			
	01	3.060.552.	3.060.552.	100%



3	03	35.798.000	35.798.000	100%
	2021			
	01	3.060.552.	3.060.552.	100%
	03	36.032.000	36.032.000	100%

Tabel 69 : Persentase Perbandingan Realisasi PNB

7. Persentase Realisasi Anggaran Belanja

Indikator kinerja persentase realisasi anggaran belanja ini mengukur perbandingan antara anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo dengan realisasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Jumlah anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

DIPA	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Penyerapan
01	Program Dukungan Manajemen	5.531.349.000	5.131.140.771	92,84 %
03	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	97.740.000	95.315.000	98,18%

Tabel 70. Anggaran Yang Diterima Pengadilan Negeri Situbondo Th 2023

Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase realisasi anggaran belanja			
	DIPA 01	98 %	92,84 %	94,73 %
	DIPA 03	98%	98,18%	100,1 %

Tabel 71. Persentase Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Th. 2023

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 98%, sedangkan untuk DIPA 01 realisasi anggaran mencapai 92,84% Sedangkan untuk DIPA 03 realisasi anggarannya sebesar 95 % tidak mencapai target



yang ditetapkan karena penyerapan di Akun 51 ada pegawai yang pensiun dan sewa rumah dinas hakim tidak bisa di serap karena kelebihan 1 (satu) orang karena akun tidak bisa di revisi (sudah dilakukan langkah-langkah) namun kewenangan Eselon 1 MARI , Untuk DIPA 03 penyerapan melampaui target yang ditetapkan dan Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo untuk meningkatkan penyerapan anggaran adalah dengan melakukan revisi anggaran dan berkoordinasi kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dan instansi terkait Perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Penyerapan
1	2023			
	01	5.531.349.000	5.131.140.771	92,84 %
	03	97.740.000	95.315.000	98,18%
2	2022			
	01	5.585.625.000	5.912.383.281	105,85,%
	03	97.815.000	96.714.400	98,86%
3	2021			
	01	5.130.048.000	5.124.195.532	99,88%
	03	96.305.000	92.218.500	96,84%

Tabel 72. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021-2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penyerapan anggaran belanja dari tahun 2021 – 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo cenderung hampir sama dan cenderung naik setiap tahunnya, khususnya pada DIPA 01 dan untuk DIPA 03 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, capaian kinerja anggaran pada DIPA 01 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 105,85 % ke 92,82 % yaitu sebesar 13,03 %. Hal ini perlu menjadi perhatian Pengadilan Negeri Situbondo untuk melaksanakan pengelolaan anggaran yang lebih baik agar anggaran yang telah diperoleh dapat terserap secara optimal.

8. Persentase Pelaporan LHKPN /LHK ASN Tepat Waktu



Indikator kinerja persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu ini mengukur perbandingan antara pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN dengan pegawai yang lapor tepat waktu.

Batas waktu pelaporan LHKPN/LHK ASN adalah 31 Maret Tahun berikutnya.

Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang lapor tepat waktu}}{\text{Jumlah Pegawai Yang Wajib Lapor LHKPN/LHKASN}} \times 100\%$$

Berikut data laporan LHKPN/ LHK ASN pegawai Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023 :

No	Jenis Laporan	Jumlah Pegawai Yang melapor	Jumlah Pegawai Yang melapor tepat waktu
1.	LHKPN	16 Orang	16 Orang
2.	LHK ASN	12 Orang	12 Orang
	Jumlah	28 Orang	28 Orang

Tabel 73. Jumlah ASN Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023

Capaian Kinerja Indikator realisasi pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu	100 %	100 %	100 %

Tabel 74. Capaian Kinerja Persentase Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2023

Tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator ini adalah sebesar 100%. Dari 28 Pegawai yang wajib lapor LHKPN dan LHK ASN, semuanya melaporkan tepat waktu, sehingga realisasinya adalah 100%, sesuai target yang ditetapkan. Jadi untuk capaian kinerja indikator persentase pelaporan LHKPN dan LHK ASN tepat waktu adalah sebesar 100%.

Perbandingan Jumlah Pegawai yang melaksanakan pelaporan LHKPN dan LHKASN tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut:



Tahun	Jumlah Pelapor LHKPN/LHKASN	Jumlah Pelapor LHKPN/LHKASN Tepat Waktu	Realisasi
2023	28	28	100%
2022	31	31	100%
2021	33	33	100%

Tabel 75. Persentase Pegawai Yang Melakukan Pelaporan LHKPN/LHKASN Tepat Waktu Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi pelaporan LHKPN/LHKASN adalah 100%, jadi tidak ada yang terlambat dalam pelaporan harta kekayaan pegawai kepada KPK, hal ini karena kesadaran pegawai akan kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan yang harus dilakukan setiap tahun sangat tinggi.

9. Persentase Nilai Kinerja Anggaran

- Indikator kinerja persentase nilai kinerja anggaran ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- Pengukuran nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada nilai IKPA yang diperoleh satuan kerja.

Capaian kinerja indikator kinerja anggara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase realisasi nilai kinerja anggaran			
	01	95	96 %	101 %
	03	95	91,02 %	95,8 %
	Rata-Rata		93,6 %	98, %

Tabel 76. Persentase Nilai Kinerja Anggaran

Target untuk indikator ini adalah 95 % sedangkan realisinya adalah 93,51%, sehingga capaian kinerja indikator persentase realisasi kinerja anggaran tahun 2022 adalah 97,90%.



Nilai IKPA dipengaruhi oleh penyerapan anggaran, pengelolaan UP dan TUP deviasi halaman III Dipa untuk revisi tahun berjalan dan capaian output.

Perbandingan nilai IKPA tahun 2021- 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Nilai Kinerja
1	2023	
	DIPA 01	101 %
	DIPA 03	95,8 %
2	2022	
	DIPA 01	96%
	DIPA 03	88,14 %
3	2021	
	DIPA 01	86,22 %
	DIPA 03	89,75%

Tabel 77. Nilai Kinerja Anggaran Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2021 – 2023

REMENTERAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran			
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dampakan SPM	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	035	005	099140	PENGADILAN NEGERI SITUBONDO	Nilai	100,00	54,13	77,20	0,00	0,00	98,01	100,00	100,00	11,45	80%	88,37
					Batas	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	5,41	15,44	0,00	0,00	9,90	0,40	25,00			
					Nilai Aspek	77,07				81,01		100,00				

Gambar 24 IKPA DIPA 01

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai IKPA pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini disebabkan karena:

1. Penyerapan anggaran yang kurang maksimal pada akun akun tertentu.
2. Capaian output ditahun 2023 digunakan sebagai kontrol indikator IKPA 2023, sedangkan ditahun 2022 tidak masuk dalam kelompok nilai perhitungan IKPA.
3. Terdapat pagu minus pada belanja pegawai dikarenakan adanya pengurangan jumlah pegawai.



Untuk mengatasi hal- hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai IKPA satuan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran pada periode awal semester I agar meningkatkan nilai IKPA pada pertengahan tahun.
2. Laporan Capaian Output dilaksanakan paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan.
3. Melakukan kontrol terhadap ketersediaan pagu khususnya pada belanja pegawai agar dapat diketahui sedini mungkin apabila terdapat pagu minus dan segera berkoordinasi dengan tingkat banding.

10. Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja

- Indikator kinerja persentase kedisiplinan masuk kerja ini mengukur tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jadwal kerja yang telah ditetapkan :

$$\frac{\text{Jumlah hari tidak hadir}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times 100\%$$

Berikut rekapitulasi kehadiran pegawai Pengadilan Negeri Situbondo berdasarkan data pada Komdanas.

No.	Bulan	Jumlah Hari Efektif	Jumlah Ketidakhadiran
1.	Januari	21	1
2.	Februari	18	0
3.	Maret	22	0
4.	April	19	0
5.	Mei	15	0
6.	Juni	21	2
7.	Juli	21	1
8.	Agustus	22	0
9.	September	22	0
10.	Oktober	21	0
11.	November	22	0
12.	Desember	22	0
	Total	246	3

Tabel 78. Rekapitulasi Absensi Pegawai PN Situbondo Tahun 2023

Capain kinerja Indikator Persentase kedisiplinan masuk kerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Persentase kedisiplinan masuk kerja	97%	99,82 %	103 %

Tabel 79. Capaian Kinerja Persentase Kedisiplinan Masuk Kerja Tahun 2023

Jumlah hari kerja selama tahun 2023 dalah 246 hari, sedangkan jumlah ketidak hadiran pegawai adalah 43 hari. Perhitungan pada indikator ini sebagai berikut:

Persentase kehadiran = (Jumlah hari tidak hadir : Jumlah hari kerja) x 100.

$$= (3 \text{ hari} : 246 \text{ hari}) \times 100.$$

$$= 1,2 \%$$

$$\text{Persentase kehadiran} = 100 \% - 1,2 \% = 99,98\%.$$

Target dari indikator persentase kedisiplinan masuk kerja adalah 97%, sedangkan realisasinya adalah 99,98 %, sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 103 %.

Tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Negeri Situbondo di dukung dengan adanya remunerasi yang diberikan setiap bulannya untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara efektif serta meningkatkan kinerja guna mewujudkan visi misi organisasi.

11. Pelanggaran Disiplin

Indikator kinerja pelanggaran disiplin mengukur tingkat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pada Pengadilan Negeri Situbondo. Berikut adalah rekapitulasi data hukuman disiplin Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023

No	Jenis Hukuman Disiplin	Jumlah Pelanggar
1	Ringan	
	a. Teguran lisan	0
	b. Teguran tertulis	0



	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	0
	Jumlah pelanggaran disiplin ringan	0
2	Sedang	
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	0
	b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun	0
	c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun	0
	Jumlah pelanggaran disiplin sedang	0
3	Berat	
	a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	0
	b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	0
	c. Pembebasan dari Jabatan	0
	d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri	0
	e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	0
	Jumlah pelanggaran disiplin berat	0

Tabel 80. Data Hukuman Disiplin Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023

Capaian Kinerja Indikator Pelanggaran Disiplin tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
1	Pelanggaran disiplin	1%	0 %	0 %

Tabel 81. Capaian Kinerja Pelanggaran Disiplin Tahun 2023

Tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran disiplin baik ringan, sedang ataupun berat yang dilakukan oleh pegawai Pengadilan Situbondo, jadi untuk capaian target pada indikator ini adalah sebesar 0 %.



SASARAN STRATEGIS 7 :

Mewujudkan Pelayanan Kesekretariatan yang baik dan prima

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Yang Baik terdapat 15 (lima belas) indikator untuk mengukurnya Indikator tersebut adalah:

N o	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6
1	Jumlah Aplikasi yang telah diselesaikan	1	1	100 %
2	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	50 Mbps	100 Mbps	200 %
3	Persentase distribusi surat	100 %	100 %	100 %
4	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	98 %	100 %	102 %
5.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	98%	100 %	102 %
6	Jumlah kerjasama antar instansi terkait	3	8	260 %
7	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat dimedia	35	81	230 %
8	Jumlah layanan pengadilan	5	6	120%
9	Jumlah pengguna layanan pengadilan	200	1211	655 %
10	Jumlah layanan bantuan hukum	34	96	282%
11	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	94 %	100%	106%
12	Jumlah pemeliharaan gedung	1 1540 m ²	1 1540 m ²	100%
13	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	7 884 m ²	7 884 m ²	100%
14	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	94	94	100%
15	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12	12	100%
RATA-RATA NILAI CAPAIAN KINERJA				129,6 %

Tabel 82. Capaian Target Kinerja Sasaran Strategis 7

1. Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan



- Dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan, Pengadilan Negeri Situbondo membuat beberapa inovasi-Inovasi ini dapat langsung oleh internal maupun Ekternal , masyarakat khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo
- Indikator ini mengukur berapa jumlah aplikasi yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Situbondo selama tahun 2023 dan manfaat yang didapatkan dari aplikasi tersebut.
Capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6
	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	1 aplikasi	1 aplikasi	100%

Tabel 83. Capaian Kinerja Jumlah Aplikasi Yang Telah Diselesaikan Tahun 2023

Tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator jumlah aplikasi yang diselesaikan adalah 1 aplikasi, sedangkan realisasinya adalah 1 aplikasi, jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah aplikasi yang telah diselesaikan adalah sebesar 100%.
Dalam kurun waktu tahun 2023, ada beberapa inovasi yang telah diciptakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo , baik berupa aplikasi maupun bukan. Inovasi- inovasi tersebut adalah:

1. Aplikasi Santri

Adalah aplikasi yang untuk monitoring pada aplikasi Survey IKM dan IPK, dan Monitoring Ketertiban Pengisian SIPP dan dilengkapi dengan Broadcast Whatsapp jika terdapat item pada pengisian SIPP yang masih belum sesuai, Aplikasi Santri juga dapat monitoring penyerapan anggaran DIPA



Gambar 26 Tampilan aplikasi Santri

Aplikasi ini sangat berguna bagi Internal antar satuan Kerja dengan adanya aplikasi ini pimpinan mudah melakukan monitoring dan Evaluasi terkait dengan TUSI terutama pengisian SIPP dan penyerapan anggaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo masing – masing satuan kerja yaitu Kejaksaan Negeri Situbondo

2. Jumlah kapasitas banwith yang memadai

- Indikator ini mengukur ketersediaan banwith yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo untuk menunjang kinerja pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo
- Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 724/ SEK /OT.01.1/5/2019, tentang petunjuk pelaksanaan SP-SABA disebutkan bahwa dalam rangka dukungan pelaksanaan e- court berupa peningkatan banwith yang regular menggunakan jasa telekomunikasi bersifat dedicated dengan ketentuan untuk Pengadilan Tingkat Banding serendah rendahnya 50 Mbps dan Pengadilan Tingkat pertama serendah-rendahnya 50 Mbps. Capaian kinerja indikator jumlah kapasita banwith yang memadai adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai	50 Mbps	100 Mbps	200%

Tabel 84 Capaian Kinerja Jumlah Kapasitas Banwith yang memadai Tahun 2023



Pada tahun 2023, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator jumlah kapasitas bandwidth yang memadai adalah 50 Mbps, sedangkan realisasinya adalah 100 Mbps, jadi untuk capaian kinerja indikator jumlah Kapasitas Bandwidth yang telah diselesaikan adalah sebesar 200%, melampaui target yang telah ditetapkan.

Sejak akhir tahun 2019, untuk belanja langganan internet pada Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran yang cukup untuk pemenuhan belanja langganan internet. Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan petunjuk Sekma untuk menggunakan internet dedicated 1:1 dengan bandwidth 50 Mbps



Gambar 27. Grafik Laporan Ketersediaan Bandwidth Internet Tahun 2023

Gambar diatas merupakan grafik laporan pemakaian internet pada Pengadilan Negeri Situbondo serta ketersediaan bandwidth internet selama tahun 2023. Dalam grafik tersebut digambarkan rata-rata tingkat kebutuhan internet maksimal pada angka 90 Mbps, sedangkan ketersediaan bandwidth dari provider adalah 100 Mbps, sehingga kapasitas bandwidth yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo sudah sangat memadai.

2. Persentase Distribusi Surat.

- Indikator kinerja persentase distribusi surat mengukur perbandingan antara surat masuk dengan surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang didistribusikan ke masing-masing bagian}}{\text{Jumlah surat masuk}} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebagai berikut:



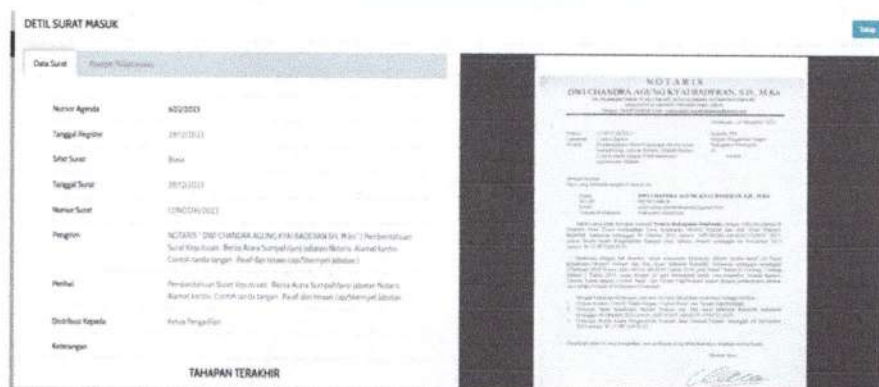
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	2	4	5	6
1	Persentase distribusi surat masuk	100%	100%	100%

Tabel 85. Capaian Kinerja Persentase Distribusi Surat Tahun 2023
 Dalam kurun waktu tahun 2023, terdapat 694 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian.

NO	Tahun	Jumlah Surat masuk	Jumlah Surat Yang didistribusikan
1	2023	692 surat	692 surat
2	2022	1385 surat	1385 surat
3	2021	1162 surat	1162 surat

Tabel 86. Jumlah Pendistribusian Surat Masuk di Pengadilan Negeri Situbondo TH 2021- 2023

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator persentase distribusi surat adalah 100%, sedangkan realisasi adalah 100%, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase distribusi surat adalah sebesar 100%, sesuai target yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Situbondo telah menggunakan aplikasi PTSP + dari Dirjen Badilum untuk pelayanan pesuratan dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap para pencari keadilan





Gambar 28. Distribusi Surat Melalui Aplikasi PTSP +

3. Persentase Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu.

- Indikator kinerja persentase tindak lanjut surat tepat waktu mengukur perbandingan antara surat yang telah ditindak lanjuti tepat waktu dengan surat masuk.
- Jumlah surat yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah jumlah surat yang ditindaklanjuti masing-masing bagian sesuai dengan disposisi pimpinan.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang telah ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah surat masuk}} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu	98%	100 %	102 %

Tabel 87. Capaian Kinerja Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu TH. 2023

Dalam kurun waktu tahun 2023, terdapat 692 surat masuk dan semuanya telah didistribusikan ke masing-masing bagian untuk ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai disposisi.

Target yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo pada indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah 98%, sedangkan realisasinya adalah 100%, melebihi target yang telah ditetapkan, jadi untuk capaian kinerja indikator persentase tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebesar 102%.





Gambar 29 Tindak Lanjut Surat Tepat Waktu Melalui Aplikasi PTSP +

4. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat.

- Indikator ini mengukur kemudahan dan kecepatan pencarian arsip surat yang telah masuk maupun surat keluar pada Pengadilan Negeri Situbondo. Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu}}{\text{Jumlah surat}} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator tindak lanjut surat tepat waktu adalah sebagai berikut:

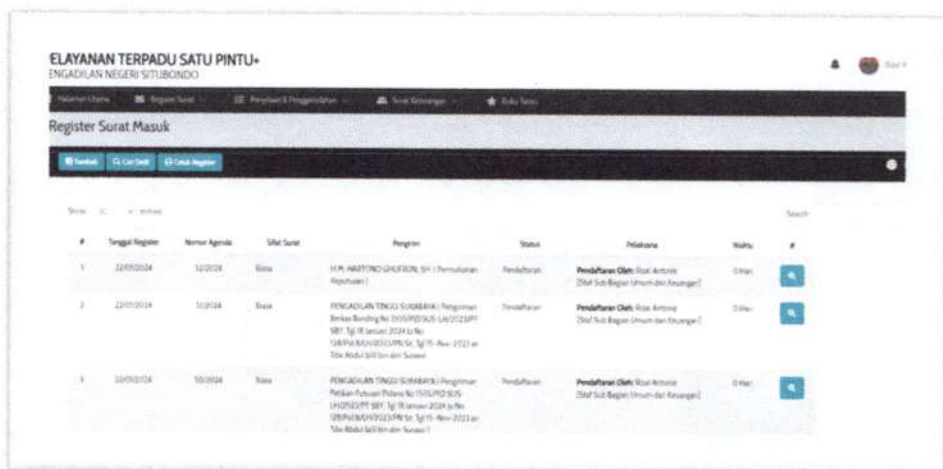
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat	95%	100%	105%

Gambar 88. Persentase Arsip Surat Yang Dapat Ditemukan Dengan Mudah Dan Cepat Tahun 2023

Target untuk indikator ini adalah 95%, sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator persentase arsip surat yang dapat ditemukan tepat waktu adalah sebesar 105%.

Tahun 2023, jumlah surat masuk yang diterima oleh Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 692 surat dan surat keluar sebanyak 1288 surat. Semua surat teregistrasi dalam aplikasi PTSP +.

Selain itu, setiap bagian juga mempunyai buku register surat masuk dan keluar untuk mempermudah dalam pencarian surat yang didisposisikan pada setiap bagian.



Gambar 30. Register Surat Masuk Pada Aplikasi PTSP +

No	Tanggal Register	Nomor Surat	Dari Register	Untuk Kirim	Status	Waktu
12	22/2/2023	SPK/08/PTSP/0008/02/2023	Keperluan Mula-Polisi	SPK/08/PTSP/0008/02/2023	Pengiriman	0 Hari
13	22/2/2023	SPK/08/PTSP/0009/02/2023	Keperluan Mula-Polisi	SPK/08/PTSP/0009/02/2023	Pengiriman	0 Hari
14	22/2/2023	SPK/08/PTSP/0010/02/2023	Keperluan Mula-Polisi	SPK/08/PTSP/0010/02/2023	Pengiriman	0 Hari
15	22/2/2023	SPK/08/PTSP/0011/02/2023	Keperluan Mula-Polisi	SPK/08/PTSP/0011/02/2023	Pengiriman	0 Hari
16	22/2/2023	SPK/08/PTSP/0012/02/2023	Keperluan Mula-Polisi	SPK/08/PTSP/0012/02/2023	Pengiriman	0 Hari

Gambar 31 Register Surat Keluar Pada Aplikasi PTSP +



Gambar 32. Buku Register Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Tiap Bagian

2. Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait.

- Indikator ini mengukur jumlah kerjasama yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Situbondo dengan instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo khususnya.

Capaian kinerja indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah Kerjasama antar instansi terkait	3	7	230 %

Tabel 89. Capaian Kinerja Jumlah Kerjasama Antar Instansi Terkait Tahun 2023



Target yang ingin dicapai pada indikator jumlah kerjasama antar instansi terkait adalah 3, sedangkan realisasinya sepanjang tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo menjalin kerjasama dengan 7 instansi/ lembaga yaitu:

1. PT. Pos Indonesia
2. PT. BRI Cabang Situbondo
3. PT. BTN Cabang Situbondo
4. Posbakumadin Situbondo untuk perjanjian pengadaan Pos Bantuan Hukum.
5. Penyedia Jasa Internet HSP
6. PDAM
7. Rumah Tahanan Negara

Sehingga capain kinerja pada indikator ini adalah 230 %.

7. Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media.

➤ Indikator ini mengukur berapa banyak berita yang tentang Pengadilan Negeri Situbondo yang dimuat di media khususnya Website dan media sosial Pengadilan Negeri Situbondo.

Capaian kinerja indikator jumlah berita tentang satuan kerja di dimuat dimedia adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media	36	81	225 %

Tabel 90. Capaian Kinerja Jumlah Berita Tentang Satuan Kerja Yang Dimuat Di Media Tahun 2023

Target pada indikator ini adalah 36 berita, sedangkan realisasinya, sepanjang tahun 2023 berita yang dimuat di media khususnya website Pengadilan Negeri Situbondo sebanyak 81 berita, sehingga capaian target pada indikator jumlah berita tentang satuan kerja yang dimuat di media adalah 225 %.

Selain media sosail lainnya (Facebook, Twiter, Inssagram) Website Pengadilan Negeri Situbondo merupakan media paling efektif untuk mempublikasikan kinerja maupun program kerja serta kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo untuk



dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, selain itu website juga dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang layanan yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo seperti layanan pubik, layanan hukum, serta profil pengadilan



Gambar 33. Berita Yang Dimuat Di Website Pengadilan Negeri Situbondo

3. Jumlah Layanan Pengadilan.

- Indikator Jumlah layanan Pengadilan menjabarkan jumlah layanan pengadilan yang dapat diterima oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo. Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah Layanan Pengadilan	5	8	160 %

Tabel 91. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengadilan Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah layanan di Pengadilan adalah 5 Layanan, sedangkan realisasinya adalah 8 Layanan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 160 %

Layanan yang ada pad Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

1. Layanan PTSP Pidana.
2. Layanan PTSP Perdata.
3. Layanan PTSP Hukum.
4. Layanan PTSP Umum
5. Layanan e-Court.
6. Layanan E Bepandu
7. Layanan Eraterang
8. Layanan Informasi Persidangan.

Semua layanan di Pengadilan Negeri Situbondo berada pada Ruang PTSP yang bertempat di loby depan kantor Pengadilan Negeri Situbondo yang tentunya mudah diakses oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan. Pada ruang PTSP disediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung juga disediakan tempat khusus untuk para penyandang disabilitas agar dapat memperoleh layanan prioritas. Selain ruang tunggu yang nyaman, juga terdapat mesin antrian PTSP untuk mempermudah pengguna pengadilan dalam memperoleh haknya untuk dilayani serta memebrikan kemudahan petugas pelayanan dalam melayani masyarakat pengguna peradilan, sehingga tercapainya *service excellent*.



Gambar 34. Ruang PTSP Pengadilan Negeri Situbondo

4. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan.



➤ Indikator jumlah pengguna layanan pengadilan mengukur berapa banyak masyarakat yang menggunakan layanan peradilan pada periode tahun 2023.

Capaian kinerja indikator jumlah pengguna layanan pengadilan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1 T a b	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan	200 Orang	76 Orang	38 %

Tabel 92. Capaian Kinerja Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah pengguna layanan Pengadilan adalah 200 orang, sedangkan realisasinya adalah 72 orang , melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 38 %.

Jumlah pengguna layanan di pengadilan dilihat dari jumlah masyarakat pengguna peradilan yang telah mengisi buku tamu dan dicatat dalam aplikasi PTSP + sepanjang tahun 2023.

Perbandingan jumlah pengguna layanan pengadilan pada tahun 2021- 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan
1.	2023	76 orang
2	2022	392 orang
3	2021	412 orang

Tabel 93. Jumlah Pengguna Layanan Pengadilan TH 2021 – 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah pengguna layanan pengadilan menurun , namun menunjukkan angka yang sedikit. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Situbondo harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.



No	Tanggal	Nomor Register	Tujuan	Nama Tamu	Keterangan
1	18/10/2023	762023	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub Bagian Umum	WINDA NISDA SAKRINTA	Memohon Malimasa PKL SD
2	04/10/2023	752023	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Madya Perdata	ELISA BELLY SANTON	Aktualisasi perubahan 302 Bawa
3	04/10/2023	763023	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub Bagian Madya Perdata	ALISHA NABILA AZZAHRA	Memohon Penjualan Kena
4	04/10/2023	732023	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Madya Perdata	TUSA	Surat pengantar di Rukan
5	04/10/2023	722023	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub Bagian Umum	ANIS HANIKH THICHAETI	PERJANJIAN GAKUT

Gambar 35. Register Tamu PTSP + Pengadilan Negeri Situbondo

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah pengguna layanan pengadilan fluktuatif, namun menunjukkan angka yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Situbondo harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kenyamanan para pengguna pengadilan guna menciptakan pelayanan prima bagi masyarakat.

5. Jumlah Layanan Bantuan Hukum.

➤ Indikator jumlah layanan bantuan hukum mengukur berapa jumlah layanan bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

Capaian kinerja indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah layanan bantuan hukum	34 Orang	96 Orang	280 %

Tabel 94. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Bantuan Hukum TH 2023

Target untuk indikator jumlah layanan bantuan hukum adalah 34 orang, sedangkan realisasinya adalah 96 orang, melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 280%.

Perbandingan jumlah layanan bantuan hukum dari tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :



No.	Tahun	Jumlah Layanan Bantuann Hukum
1.	2023	96 orang
2	2022	29 orang
3	2021	24 orang

Tabel 95. Jumlah Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021 – 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, kurang optimal karena perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Situbondo dibawah 500 perkara .

Pengadilan Negeri Situbondo melaksanakan kerja sama dengan penyedia jasa layanan bantuan hukum melalui perjanjian kerjasama dengan lembaga bantuan hukum POSBAKUMADIN untuk layanan pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan atau penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum dan memberikan tempat yang representatif bagi petugas Posbakum agar bisa memberikan advise hukum dan pendampingan terdakwa selama persidangan terhadap orang kurang mampu.

6. Persentase Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian.

- Indikator kinerja persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian mengukur perbandingan antara jumlah pengusulan kepegawian seperti usulan jabatan dan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) dengan penyelesaian usulan Kepegawaian.

Dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian}}{\text{Jumlah Usulan Kepegawaian}} \times 100\%$$

Capaian kinerja indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	94 %	100%	106%

Tabel 96. Persentase Capaian Kinerja Pengusulan Dan



Penyelesaian Usulan Kepegawian Tahun 2023

Target untuk indikator persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 94 % orang, sedangkan realisasinya adalah 100% melampaui target yang telah ditetapkan. Sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 106%.

Tahun 2023 usulan jabatan pada Pengadilan Negeri Situbondo sejumlah 8 orang dan usulan KGB sejumlah 8 orang dan semua usulan telah diselesaikan dan ditindaklanjuti.

Perbandingan realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahun	Jumlah Usulan Kepegawaian (Usulan Jabatan dan KGB)	Jumlah Penyelesaian Usulan Kepegawaian	Realisasi
1	2023	16	16	100 %
2	2022	27	27	100 %
3	2021	23	23	100 %

Tabel 97. Persentase Realisasi Pengusulan Dan Penyelesaian Usulan Kepegawaian Tahun 2021 - 2023

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, realisasi persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian adalah 106%, artinya setiap usulan kepegawian yang diajukan semua diselesaikan dengan baik. Pengusulan kepegawaian baik usulan kenaikan pangkat, usulan pensiun, usulan jabatan ataupun kenaikan gaji berkala adalah hak setiap pegawai yang harus dipenuhi untuk menunjang kinerja pegawai agar dapat memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pengguna pengadilan

7. Jumlah Pemeliharaan Gedung.

➤ Indikator jumlah pemeliharaan gedung mengukur jumlah luasan gedung Pengadilan dan anggaran yang didapat oleh satuan kerja.

Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah pemeliharaan gedung	1/ 1540 m ²	1/ 1540 m ²	100%

Tabel 98. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Tahun 2023



Target untuk indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah 1 (satu) unit volume 1540 m², dihitung dari luasan gedung dan bangunan yang dilakukan pemeliharaan sesuai dengan RKA-KL tahun 2023, sedangkan realisasinya adalah 1540 m² sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.

Volume kegiatan untuk belanja gedung dan bangunan pada tahun 2023 adalah 1540 m² terdiri dari :

1. Gedung kantor 1540 m²
2. Halaman gedung 514 m²

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo mendapatkan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dengan pagu awal sebesar Rp. 211.288.000, oleh karena terdapat perubahan kebutuhan satuan kerja, maka diadakan revisi anggaran sehingga anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi Rp. 239.210.000,-

Kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan selama tahun 2023 adalah :

1. Pembuatan Kamar mandi di Pos Satpam
2. Penggantian Kaca lantai 2 , Penutupan kisi-kisi serta Pengecatan gedung dengan warna baru bagian depan
3. Penggantian Kaca lantai 1 , Penutupan kisi-kisi serta Pengecatan gedung dengan warna baru bagian samping
4. Penutupan kisi-kisi lantai satu dan perbaikan Talang serta Resplang bagian lantai 2 Pengecatan gedung warna baru dan kusen bagian depan
5. Pengecatan gedung dan Plafon warna baru dan kusen bagian depan
6. Serta perbaikan lain – lain yang sesuai kebutuhan dan
7. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor dan Pembelian BBM alat pemotong rumput

Kantor Pengadilan Negeri Situbondo merupakan bangunan yang belum sesuai dengan prototype. Pengajuan usulan pembangunan gedung kantor sesuai prototype sudah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo namun belum mendapat realisasi dari pusat dikarenakan ada target prioritas Mahkamah Agung untuk pembangunan gedung pengadilan - pengadilan terdampak bencana alam dan yang baru di bentuk (Pemekaran Kabupaten Dan Kota)



8. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas.

- Indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas menghitung jumlah rumah dinas yang dilakukan pemeliharaan dengan anggaran yang didapatkan satuan kerja. Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah pemeliharaan gedung	7 Unit	7 Unit	100%

Tabel 99. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan rumah dinas adalah 7 unit sesuai dengan volume yang ada di RKA-KL tahun 2023, sedangkan realisasinya adalah 7 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

Pengadilan Negeri Situbondo memiliki rumah dinas sebanyak 7 rumah dinas terdiri dari

- 1 (satu) Unit rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
- 1 (satu) Unit rumah dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
- 3 (tiga) unit rumah dinas Hakim,
- 1 (satu) unit rumah dinas Panitera,
- 1 (satu) unit rumah dinas hakim tidak ditempati dalam keadaan rusak sedang dan terlalu luas (bekas kantor lama PA) Untuk pemeliharaan rumah dinas pada anggaran Rkaki 2023 sebesar Rp 88.400.000.

9. Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Mesin Kantor.

- Indikator jumlah pemeliharaan peralatan mesin/kantor menghitung jumlah pemeliharaan peralatan mesin kantor dan anggaran yang disediakan untuk pemeliharaan peralatan mesin kantor satuan kerja. Capaian kinerja indikator jumlah pemeliharaan gedung adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
----	-------------------	--------	-----------	----------------------------



				kinerja
1	Jumlah pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 unit	94 unit	100%

Tabel 100. Capaian Kinerja Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan /Mesin Kantor Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor adalah 94 unit, sedangkan realisasinya adalah 94 unit, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%

Dalam RKA-KL tahun 2023, peralatan dan mesin kantor yang mendapatkan anggaran pemeliharaan adalah AC Split, komputer, printer, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dan, bahan bakar genset dengan jumlah anggaran Rp.185.987.000.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo tidak ada pengadaan belanja modal

10. Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

- Indikator Layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga mengukur jumlah layanan yang diberikan oleh kesekretaraiatan sebagai supporting unit untuk keberlangsungan administrasi perkantoran di lingkungan Pengadilan Negeri Situbondo.

Capaian kinerja indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Presentase Capaian kinerja
1	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 Layanan	12 Layanan	100%

Tabel 101. Capaian Kinerja Jumlah Layanan Pengelolaan Keamanan, Urusan Tata Usaha Dan Rumah Tangga Tahun 2023

Target untuk indikator jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga adalah 12 layanan , sedangkan realisasinya adalah 12 layanan, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100%.



Jenis layanan internal yang terdapat pada pengadilan negeri Situbondo adalah :

1. Layanan keamanan kantor.

Layanan ini meliputi keamanan dalam kantor maupun keamanan luar kantor. Sarana layanan keamanan dilengkapi dengan terdapatnya pos jaga, metal detector, dan 3 (tiga) orang petugas keamanan yang berjaga dengan shif.

2. Layanan tata usaha dan rumah tangga

Layanan ini merupakan pendukung utama kantor dalam hal pemenuhan kebutuhan pesonil pengadilan (Pramubakti dan Sopir) Layanan ini meliputi kebutuhan ATK kantor serta kebutuhan sarana dan prasarana kantor.

SASARAN STRATEGIS 8 :
Penuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan

Untuk mengetahui capaian tingkat Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola Yang Baik terdapat 1 (satu) indikator untuk mengukurnya Indikator tersebut adalah:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	80%	100%	125 %
NILAI CAPAIAN KINERJA				125 %

Tabel 102. Ralisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

- Indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan menghitung jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Situbondo guna menunjang kinerja serta mendukung pelayanan terhadap masyarakat pengguna pengadilan.

Capaian kinerja indikator terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan	80%	100%	125 %

Tabel 103. Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan Tahun 2023

Target untuk indikator Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung peayanan peradilan 80% , sedangkan realisasinya adalah 100%, sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 125 %. Sarana dan prasarana yang terdapat pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Tersedianya prasarana ruang tamu terbuka.
3. Tersedianya ruang kesehatan dan laktasi.
4. Tersedianya tempat bermain anak
5. Tersedianya ruang tunggu sidang.
6. Tersedianya ruang mediasi.
7. Tersedianya fasilitas untuk Difabel.
8. Tersedianya genset untuk kegiatan operasional kantor.
9. Tersedianya ruang Media center

Pengadilan Negeri Situbondo selalu berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan peradilan. Anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan peradilan tersebut didapat dari Mahkamah Agung maupun hibah

C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.531.349.000,- (Lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)



2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.740.000,- (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

1. REVISI DIPA

Dalam rangka penyesuaian anggaran belanja dengan perubahan kebutuhan dan percepatan pencapaian kinerja, perlu dilakukan perubahan rincian anggaran belanja Pengadilan Negeri Situbondo melalui revisi DIPA.

Selama periode berjalan Pengadilan Negeri Situbondo telah mengadakan beberapa revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Revisi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) tahun 2023 adalah :

1. Revisi DIPA 01 ke 1 (12 April 2023)

Melakukan Revisi untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA

2. Revisi DIPA ke 2 (24 Juli 2023)

Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker karena ada kegiatan yang tidak terpakai :

521111 D : Belanja Kepeluan Perkantoran :

- Kelebihan anggaran Pakaian Dinas Non Hakim Rp. 5.530.000.000
- Kelebihan anggaran Linsensi Vidio Conferen Rp. 2.976.000.000
- MENJADI ditambahkan ke

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Konsultasi ke KPPN/DJKN

- Uang Transport sebesar Rp. 2.620.0000.

523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 4.312.0000.

523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Pemeliharaan Perangkat Jaringan sebesar Rp. 484.0000.

3. Revisi DIPA ke 3 (13 September 2023)

Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun , karena ada kelebihan anggaran dan ada yang kekurangan anggaran :

521252 : Belanja Peralatan dan Mesin :

- Kelebihan anggaran Pengadaan Inventarisasi CPNS Rp. 1.878,000.000

521111 B : Belanja Kepeluan Perkantoran :

- Kelebihan anggaran Pelantikan dan sumpah Rp. 4.869.000
- MENJADI ditambahkan ke Akun .



523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 1.540.0000.

521811 Belanja Barang Persediaan barang konsumsi

- Belanja Bahan Kepeluan Kantor sehari-hari Rp. 207.0000

4. Revisi Dipa ke 4 (13 Nopember 2023)

Melakukan Revisi POK pergeseran antar akun , karena ada kelebihan anggaran dan ada yang kekurangan anggaran :

521119 B : Belanja Kepeluan Perkantoran :

- Kelebihan anggaran Pelantikan dan sumpah Rp. 4.869.000

523121 - Kelebihan anggaran Pemeliharaan Genjet Rp. 2.500.000

522113 : Belanja Kepeluan Perkantoran :

- Kelebihan anggaran Langganan air Rp. 8.400.000
- MENJADI ditambahkan ke Akun

523111 Pemeliharaan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Gedung Kantor Rp. 3.080.0000.

521811 Belanja Barang Persediaan barang konsumsi

- Belanja Bahan Kepeluan Kantor sehari-hari Rp.5.600.0000

523121 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

- Belanja bahan bakar genset Rp.2.500.0000

Revisi DIPA 03 (Ditjen Baan Peradilan Umum) tahun 2023 adalah :

1. Revisi Dipa ke 1 (12 April 2023)

Melakukan Revisi untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA

2. Revisi Dipa ke 2 (13 Juli 2023)

Melakukan Revisi untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker dengan DJKN Jawa Timur pada halaman 3 DIPA dan pergeseran

- ❖ Belanja barang konsumsi persediaan barang konsumsi
Akun 521811 – Alat tulis kantor
Semula Rp. 90.000. menjadi Rp. 136.000.

3. Revisi Dipa ke 3 (27 September 2023)

Melakukan Revisi untuk sinkronisasi Rincian Kertas Kerja Satker karena ada pergeseran antar akun :

Pendaftaran Berkas Perkara

- ❖ Belanja barang konsumsi persediaan barang konsumsi
Akun 521811 – Alat tulis kantor
Semula Rp 136.000. menjadi Rp. 120.000



- ❖ Belanja barang konsumsi persediaan barang konsumsi
Akun 521211 – Penggandaan dan penjilidan berkas perkara
Semula Rp. 45.000. menjadi Rp.37.500

PENYERAPAN ANGGARAN

Selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara. Pengadilan sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN. Pada satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo pada tahun anggaran 2023 mendapatkan 2 (Dua) DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) / DIPA 01 (098211) dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) / DIPA 03 (099146)

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (098221)

DIPA 01 dilaksanakan dalam rangka program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan yaitu layanan perkantoran seperti pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pemeliharaan peralatan perkantoran, perawatan kendaraan dinas dan perawatan gedung dan bangunan. Pada tahun anggaran 2023 DIPA 01 mendapat pagu sebesar Rp.5.531.349.000,00 (Lima milyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Dari total pagu DIPA Rp. 5.531.349.000,00 dapat terealisasi 92.84% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.5.526.558.000,00.(Lima milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Dari daftar rincian realisasi kegiatan, semua jenis belanja berhasil terserap diatas 98,75 % dari pagu anggaran yaitu Kegiatan belanja pegawai sebesar 90,76 %, Berikut adalah tabel rincian realisasi anggaran DIPA 01

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Pegawai	4.085.459.000,00	3.708.119.249,00	90,76 %	395.339.751,00	- 6,34%
Barang	1.441.099.000,00	1.423.021.522,00	98,75 %	18.077.479,00	01,75%
Modal	0	0		0	
Total	5.526.558.000	5.131.140.771	92,84%	395.417.229	(7,16%)

Tabel 104 : Realisasi Belanja DIPA 01



2. DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum (099146)

Sedangkan DIPA 03 dilaksanakan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum. Pada tahun anggaran 2023 DIPA 03 mendapatkan dana sebesar Rp. 96.740.000,00 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah) untuk kegiatan yang berhubungan dengan administrasi penyelesaian perkara.

Pada DIPA Badan Peradilan Umum terserap sebesar Rp 95.315.000,00 atau 98,53,%. Dari anggaran yang tersedia

Berikut adalah tabel rincian realisasi anggaran DIPA 03 :

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa	
		Rp	%	Rp	%
Barang	78.440.000,00	77.015.500,00	98,18 %	1.1425..000	1,82 %
Kimwasmat	1.500.000,00	1.500.000,00	100 %	0	0 %
Pos Bankum	16.800.000,00	16.800.000,00	100 %	0	0 %
Total	96.740.000,00	95.315.000,00	98,53 %	1.1425..000	1,47%

Tabel 105 : Realisasi Belanja DIPA 03

Rincian realisasi penyerapan anggaran pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut :

A. DIPA 01

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2023 sebesar Rp. 4.085.459.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.708.119.249,00 dengan jumlah pegawai 30 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 90,76 % . , tidak optimalnya penyerapan ada beberapa pegawai pesiun dan mutasi diakhir tahun (Laporan Realisasi anggaran kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini).

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2023 sebesar Rp. 1.441.099.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.423.021.522,00 sehingga penyerapan anggaran mencapai 98,75 %. Realisasi anggaran belanja barang, penyerapan kurang optimal karena ada belanja bantuan sewa rumah dinas hakim sebanyak 1 (satu) orang hakim , dan kami tidak memlakukan revisi terkait akun dimaksud karena kewenangan eselon 1 MARI , dan kami telah melakukan koordinasi dengan korwil Jatim yaitu



Pengadilan Tinggi Surabaya namun belum terlealisasi, (kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.)

B. DIPA 03

1. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2023 sebesar Rp. 96.740.000 yang dialokasi pada mata anggaran Biaya perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama, Pos Layanan Hukum di telah direalisasikan sebesar Rp. 95.315.000,00 sehingga penyerapan anggaran mencapai 98.18 %. Adanya sisa anggaran yang tidak terserap mengenai jenis belanja "biaya perkara pidana yang diselesaikan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali , Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2023 dan DIPA-03 Tahun 2023 telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2023 pada satker Pengadilan Negeri Situbondo telah mencapai 92,84%. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-03 Dirjen Badilum, mencapai 98.53 %.

Maka untuk total penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 adalah 95.51%.



Tabel 106 : REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 01 : DIPA Badan Urusan Administrasi (098221)

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5.531.349,000	0	4.957.501,132	178.430.639	5.135.931,771	92,85 %	395.417,229
NA Program Dukungan Manajemen	5.531.349,000	0	4.957.501,132	178.430.639	5.135.931,771	92,85 %	395.417,229
VA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5.531.349,000	0	4.957.501,132	178.430.639	5.135.931,771	92,85 %	395.417,229
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.531.349,000	0	4.957.501,132	178.430.639	5.135.931,771	92,85 %	395.417,229
EBA.962 Layanan Umum	4.791,000	0	4.791,000	0	4.791,000	100,00 %	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Sal/ker Gaerah	4.791,000	0	4.791,000	0	4.791,000	100,00 %	0
051.0A Inventaris Perkantoran CPNS	4.791,000	0	4.791,000	0	4.791,000	100,00 %	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.791,000	0	4.791,000	0	4.791,000	100,00 %	0
000072. Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	4.791,000	0	4.791,000	0	4.791,000	100,00 %	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	5.526.558,000	0	4.952.710,132	178.430.639	5.131.140,771	92,85 %	395.417,229
001 Gaji dan Tunjangan	4.085.459,000	0	3.666.196,249	41.923,000	3.708.119,249	90,76 %	377.339,751
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	4.085.459,000	0	3.666.196,249	41.923,000	3.708.119,249	90,76 %	377.339,751
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1.716.263,000	0	1.521.657,700	0	1.521.657,700	88,66 %	194.605,300
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	1.470.787,000	0	1.312.590,300	0	1.312.590,300	89,24 %	158.196,700
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	126.798,000	0	104.815,800	0	104.815,800	82,66 %	21.982,200
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	118.678,000	0	104.251,600	0	104.251,600	87,84 %	14.426,400
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,000	0	19,628	0	19,628	72,70 %	7,372
000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS	23,000	0	15,948	0	15,948	69,34 %	7,052
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	2,000	0	1,738	0	1,738	86,90 %	262
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	1,942	0	1,942	97,10 %	58
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	111.440,000	0	105.428,358	0	105.428,358	94,61 %	6.011,642
000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	95.454,000	0	91.517,278	0	91.517,278	95,88 %	3.936,722
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	8.307,000	0	6.983,750	0	6.983,750	84,07 %	1.323,250
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	7.679,000	0	6.927,330	0	6.927,330	90,21 %	751,670
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	35.344,000	0	35.263,442	0	35.263,442	99,77 %	80,558
000010. Belanja Tunj. Anak PNS	30.943,000	0	30.873,442	0	30.873,442	99,73 %	70,558



Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000011. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2.289,000	0	2.305,112	0	2.305,112	100.70	-16,112
000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2.112,000	0	2.284,864	0	2.284,864	108.18	-172,864
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	36,400,000	0	36,400,000	0	36,400,000	100.00	0
000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS	31,200,000	0	31,200,000	0	31,200,000	100.00	0
000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	100.00	0
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,552,910,000	0	1,500,105,000	0	1,500,105,000	96.60 %	52,805,000
000016. Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,333,500,000	0	1,288,335,000	0	1,288,335,000	96.61 %	45,165,000
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 13)	118,925,000	0	105,885,000	0	105,885,000	89.04 %	13,040,000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS (Gaji ke 14)	100,485,000	0	105,885,000	0	105,885,000	105.37	-5,400,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	178,930,000	0	169,688,301	0	169,688,301	94.84 %	9,241,699
000019. Belanja Tunjangan PPh PNS	130,696,000	0	126,479,741	0	126,479,741	96.77 %	4,216,259
000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	25,898,000	0	21,642,680	0	21,642,680	83.57 %	4,255,320
000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	22,336,000	0	21,565,880	0	21,565,880	96.55 %	770,120
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	84,876,000	0	81,182,820	0	81,182,820	95.65 %	3,693,180
000022. Belanja Tunj Beras PNS	84,876,000	0	81,182,820	0	81,182,820	95.65 %	3,693,180
511129 Belanja Uang Makan PNS	328,740,000	0	204,011,000	41,923,000	245,934,000	74.81 %	82,806,000
000023. Belanja Uang Makan PNS	328,740,000	0	204,011,000	41,923,000	245,934,000	74.81 %	82,806,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	40,529,000	0	12,440,000	0	12,440,000	30.69 %	28,089,000
000024. Belanja Tunjangan Umum PNS	34,739,000	0	10,610,000	0	10,610,000	30.54 %	24,129,000
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	2,895,000	0	915,000	0	915,000	31.61 %	1,980,000
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	2,895,000	0	915,000	0	915,000	31.61 %	1,980,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,441,999,000	0	1,286,513,883	136,507,839	1,423,021,522	98.75 %	18,077,478
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	541,954,000	0	494,331,991	47,578,168	541,910,159	99.99 %	43,841
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	482,116,000	0	444,044,700	38,033,168	482,077,868	99.99 %	38,132
000027. Satpam	99,240,000	0	90,970,000	8,270,000	99,240,000	100.00	0
000028. Pengemudi	148,860,000	0	136,455,000	12,405,000	148,860,000	100.00	0



Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000029. Pramubakti	180,432,000	0	165,396,000	15,036,000	180,432,000	100.00	0
000030. TI I/R Gatpam	8,270,000	0	8,270,000	0	8,270,000	100.00	0
000031. THR Pengemudi	12,405,000	0	12,405,000	0	12,405,000	100.00	0
000032. THR Pramubakti	15,036,000	0	15,036,000	0	15,036,000	100.00	0
000033. Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	12,873,000	0	10,512,700	2,322,168	12,834,868	99.70 %	38,132
000074. Pembelian Inventarisasi di bawah kapitalisasi	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59,838,000	0	50,287,291	9,545,000	59,832,291	99.99 %	5,709
000034. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	59,838,000	0	50,287,291	9,545,000	59,832,291	99.99 %	5,709
002.0B LANGGANAN DAYA DAN JASA	190,656,000	0	172,053,710	17,349,942	189,403,652	99.34 %	1,252,348
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	175,356,000	0	160,254,500	14,525,500	174,780,000	99.67 %	576,000
000035. Langganan Internet	170,556,000	0	155,820,500	14,165,500	169,986,000	99.67 %	570,000
000036. Lisensi Video Conference	4,800,000	0	4,434,000	360,000	4,794,000	99.88 %	6,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,200,000	0	3,473,000	635,500	4,108,500	97.82 %	91,500
000037. Biaya Pengiriman Surat Dinas/Pos	4,200,000	0	3,473,000	635,500	4,108,500	97.82 %	91,500
522112 Belanja Langganan Telepon	1,500,000	0	1,197,210	239,442	1,436,652	95.78 %	63,348
000038. Langganan Telepon	1,500,000	0	1,197,210	239,442	1,436,652	95.78 %	63,348
522113 Belanja Langganan Air	9,600,000	0	7,129,000	1,949,500	9,078,500	94.57 %	521,500
000039. Langganan Air	9,600,000	0	7,129,000	1,949,500	9,078,500	94.57 %	521,500
002.0C PEMELIHARAAN KANTOR	513,607,000	0	472,157,920	41,340,300	513,498,220	99.98 %	108,780
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	239,220,000	0	234,210,000	5,000,000	239,210,000	100.00	10,000
000040. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	5,140,000	0	5,137,000	0	5,137,000	99.94 %	3,000
000041. Pemeliharaan Gedung Kantor	234,080,000	0	229,073,000	5,000,000	234,073,000	100.00	7,000
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	88,400,000	0	88,364,000	0	88,364,000	99.96 %	36,000
000042. Pemeliharaan Rumah Dinas	88,400,000	0	88,364,000	0	88,364,000	99.96 %	36,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	185,987,000	0	149,583,920	36,340,300	185,924,220	99.97 %	62,780
000043. Pemeliharaan Genset	1,690,000	0	1,670,000	0	1,670,000	98.82 %	20,000
000044. BBM Genset	5,500,000	0	2,831,100	2,656,000	5,487,100	99.77 %	12,900

DENGADILAN NEGERI SITUBONDO



Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Periode Lalu	Realisasi TA 2023		SISA ANGGARAN
				Periode Ini	s.d Periode %	
000045. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	21.900.000	0	17.865.500	4.030.000	21.895.500 99,98 %	4.500
000046. Pemeliharaan PC	16.779.000	0	12.290.000	4.485.000	16.775.000 99,98 %	4.000
000047. Pemeliharaan Printer	13.800.000	0	13.792.500	0	13.792.500 99,95 %	7.500
000048. Pemeliharaan AC Split	13.420.000	0	10.625.000	2.790.000	13.415.000 99,96 %	5.000
000049. Pemeliharaan Perangkat Jaringan	5.378.000	0	5.115.000	260.000	5.375.000 99,94 %	3.000
000050. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	107.520.000	0	85.394.820	22.119.300	107.514.120 99,99 %	5.880
002 00 PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	94.522.000	0	82.180.000	12.334.000	94.514.000 99,99 %	8.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	20.518.000	0	20.510.000	0	20.510.000 99,96 %	8.000
000051. Pakaihan Dinas Pegawai Non Hakim	12.075.000	0	12.070.000	0	12.070.000 99,96 %	5.000
000052. Seragam Pegawai CPNS	4.560.000	0	4.560.000	0	4.560.000 100,00 %	0
000053. Pakaihan Kerja Salpam	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000 100,00 %	0
000054. Pakaihan Kerja Pengemudi	1.153.000	0	1.150.000	0	1.150.000 99,74 %	3.000
000055. Pakaihan Kerja Pramudaka	1.480.000	0	1.480.000	0	1.480.000 100,00 %	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74.004.000	0	61.670.000	12.334.000	74.004.000 100,00 %	0
000056. Honor Bendahara PNBK	3.600.000	0	3.000.000	600.000	3.600.000 100,00 %	0
000057. Honor Kuasa Pengguna Anggaran	21.756.000	0	18.130.000	3.626.000	21.756.000 100,00 %	0
000058. Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM	11.880.000	0	9.900.000	1.980.000	11.880.000 100,00 %	0
000059. Honor Bendahara Pengeluaran	8.400.000	0	7.000.000	1.400.000	8.400.000 100,00 %	0
000060. Honor Staf Pengelola Keuangan	7.200.000	0	6.000.000	1.200.000	7.200.000 100,00 %	0
000061. Honor Pejabat Pembuat Komitmen	21.168.000	0	17.640.000	3.528.000	21.168.000 100,00 %	0
002 0G RAPAT KOORDINASI INTERNAL	4.000.000	0	800.000	2.025.000	2.825.000 70,62 %	1.175.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	4.000.000	0	800.000	2.025.000	2.825.000 70,62 %	1.175.000
000064. Konsumsi	4.000.000	0	800.000	2.025.000	2.825.000 70,62 %	1.175.000
002 0H KONSULTASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING	54.080.000	0	39.571.100	9.820.229	49.391.329 91,33 %	4.688.671
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.080.000	0	39.571.100	9.820.229	49.391.329 91,33 %	4.688.671
000065. Transport Rul	8.000.000	0	6.258.000	1.724.900	7.982.900 99,79 %	17.100
000066. Penerimaan	10.000.000	0	5.843.100	1.535.329	7.378.429 73,78 %	2.621.571



Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000067. Uang Harian	36.080,000	0	27.470,000	6.560,000	34,030,000	94.32 %	2.050,000
002.0I KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL	9.840,000	0	7.380,000	2.460,000	9.840,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.840,000	0	7.380,000	2.460,000	9.840,000	100.00	0
000068. Uang Harian	9.840,000	0	7.380,000	2.460,000	9.840,000	100.00	0
002.0J PENANGGULANGAN COVID-19	40,000	0	39,162	0	39,162	97.91 %	838
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	40,000	0	39,162	0	39,162	97.91 %	838
000070. Penyemprotan disinfektan	40,000	0	39,162	0	39,162	97.90 %	838
002.0K Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	32.400,000	0	18,000,000	3,600,000	21,600,000	66.67 %	10.800,000
522141 Belanja Sewa	32.400,000	0	18,000,000	3,600,000	21,600,000	66.67 %	10.800,000
000071. Bantuan Sewa Rumah Dinas	32.400,000	0	18,000,000	3,600,000	21,600,000	66.67 %	10.800,000



TABEL 107 PENYERAPAN ANGGARAN DIPA 03 : DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum (099146)

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	96.740.000	0	78.319.500	16.995.500	95.315.000	98.53 %	1.425.000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	96.740.000	0	78.319.500	16.995.500	95.315.000	98.53 %	1.425.000
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	96.740.000	0	78.319.500	16.995.500	95.315.000	98.53 %	1.425.000
AEA Koordinasi	1.500.000	0	750.000	750.000	1.500.000	100.00	0
AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	1.500.000	0	750.000	750.000	1.500.000	100.00	0
052 Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	0	750.000	750.000	1.500.000	100.00	0
052.0A Kimwasmat	1.500.000	0	750.000	750.000	1.500.000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	0	750.000	750.000	1.500.000	100.00	0
000001. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	0	750.000	750.000	1.500.000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Perseorangan	78.440.000	0	63.569.500	13.445.500	77.015.000	98.18 %	1.425.000
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	78.440.000	0	63.569.500	13.445.500	77.015.000	98.18 %	1.425.000
051 Pendaftaran Berkas Perkara	32.100.000	0	24.554.500	7.025.000	31.579.500	98.38 %	520.500
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	32.100.000	0	24.554.500	7.025.000	31.579.500	98.38 %	520.500
521211 Belanja Bahan	6.660.000	0	4.223.000	1.961.000	6.184.000	92.85 %	476.000
000002. Pengandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	6.660.000	0	4.223.000	1.961.000	6.184.000	92.85 %	476.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.440.000	0	20.331.500	5.064.000	25.395.500	99.83 %	44.500
000003. Alat Tulis Kantor	25.440.000	0	20.331.500	5.064.000	25.395.500	99.83 %	44.500
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	12.600.000	0	12.560.000	0	12.560.000	99.68 %	40.000
053.0A Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	12.600.000	0	12.560.000	0	12.560.000	99.68 %	40.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000	0	12.560.000	0	12.560.000	99.68 %	40.000
000004. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	12.600.000	0	12.560.000	0	12.560.000	99.68 %	40.000
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	6.000.000	0	5.540.000	420.000	5.960.000	99.33 %	40.000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	6.000.000	0	5.540.000	420.000	5.960.000	99.33 %	40.000
521211 Belanja Bahan	6.000.000	0	5.540.000	420.000	5.960.000	99.33 %	40.000
000005. Komsumsi Makan Terdakwa	6.000.000	0	5.540.000	420.000	5.960.000	99.33 %	40.000
055 Pengiriman Petkar/ Solusin Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	12.600.000	0	9.290.000	3.150.000	12.440.000	98.73 %	160.000

DENGADILAN NEGERI SITUBONDO



Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
055.0A Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	12.600.000	0	9.290.000	3.150.000	12.440.000	98.73 %	160.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000	0	9.290.000	3.150.000	12.440.000	98.73 %	160.000
000007. Pengiriman Salinan Putusan	12.600.000	0	9.290.000	3.150.000	12.440.000	98.73 %	160.000
056 Minutasi/Upaya hukum	7.200.000	0	5.615.000	1.560.000	7.175.000	99.65 %	25.000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	7.200.000	0	5.615.000	1.560.000	7.175.000	99.65 %	25.000
521211 Belanja Bahan	7.200.000	0	5.615.000	1.560.000	7.175.000	99.65 %	25.000
000008. Penggandaan dan Penjilidan Berkas	7.200.000	0	5.615.000	1.560.000	7.175.000	99.65 %	25.000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	4.755.000	0	3.785.000	583.000	4.368.000	91.86 %	387.000
057.0A Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	4.755.000	0	3.785.000	583.000	4.368.000	91.86 %	387.000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	555.000	0	0	233.000	233.000	41.98 %	322.000
000009. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	555.000	0	0	233.000	233.000	41.98 %	322.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000	0	3.785.000	350.000	4.135.000	98.45 %	65.000
000010. Pemberitahuan Biaya Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	2.800.000	0	2.625.000	140.000	2.765.000	98.75 %	35.000
000011. Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	1.400.000	0	1.160.000	210.000	1.370.000	97.86 %	30.000
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	3.185.000	0	2.225.000	707.500	2.932.500	92.07 %	252.500
058.0A Penangan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	3.185.000	0	2.225.000	707.500	2.932.500	92.07 %	252.500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	455.000	0	0	287.500	287.500	63.19 %	167.500
000012. Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	455.000	0	0	287.500	287.500	63.19 %	167.500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.730.000	0	2.225.000	420.000	2.645.000	96.89 %	85.000
000013. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	1.050.000	0	575.000	420.000	995.000	94.76 %	55.000
000014. Pemberitahuan Biaya Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	1.680.000	0	1.650.000	0	1.650.000	98.21 %	30.000
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	16.800.000	0	14.000.000	2.800.000	16.800.000	100.00	0
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	16.800.000	0	14.000.000	2.800.000	16.800.000	100.00	0
051 Pos Bantuan Hukum	16.800.000	0	14.000.000	2.800.000	16.800.000	100.00	0



Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	16.800.000	0	14.000.000	2.800.000	16.800.000	100.00	0
522131 Belanja Jasa Konsultan	16.800.000	0	14.000.000	2.800.000	16.800.000	100.00	0
000015. Honor Advokat/Pengacara Piket	16.800.000	0	14.000.000	2.800.000	16.800.000	100.00	0



BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang memuat laporan capaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo selama kurun waktu Tahun 2023 yang dituangkan dalam 8 (empat) target sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Situbondo, ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Situbondo karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama Tahun 2023 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Situbondo, Tahun 2023 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan yang terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Situbondo, keberhasilan yang dicapai pada Tahun 2023 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja

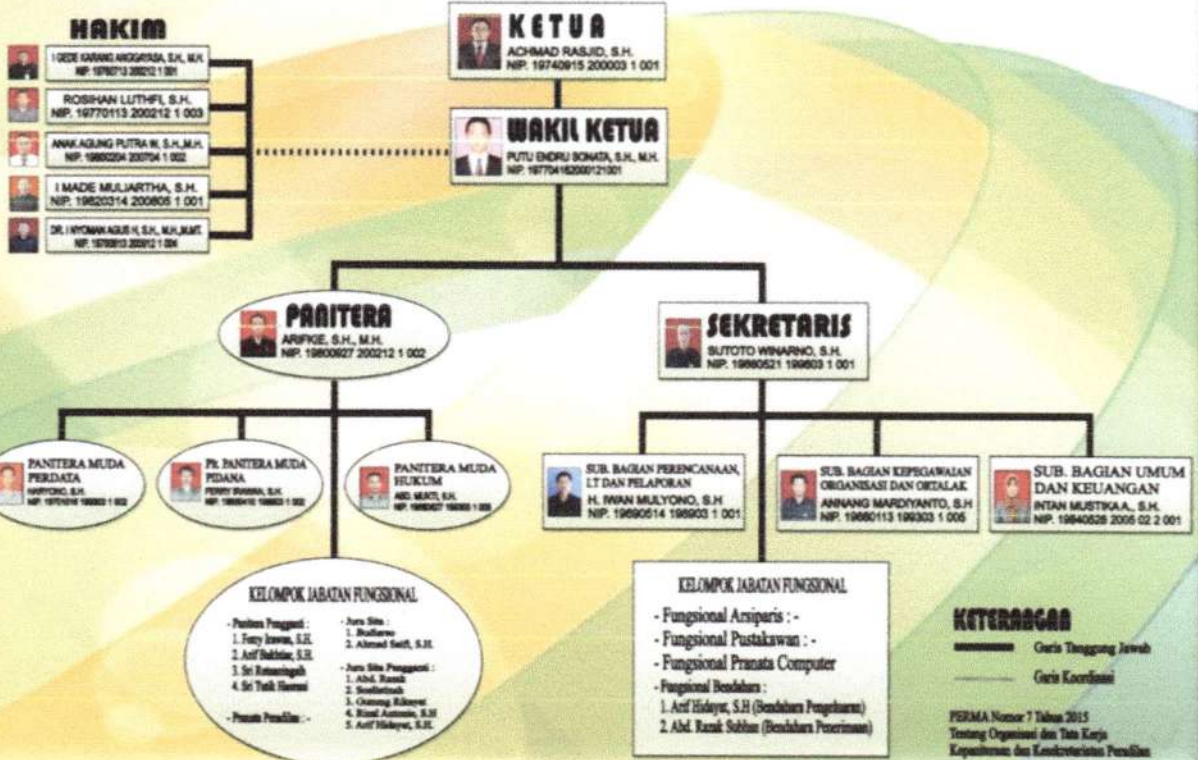


Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Situbondo, Tahun 2023 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga dapat tercapai tujuan yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Situbondo yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Situbondo.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ACHMAD RASJID, S.H.
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

selanjutnya disebut sebagai *pihak pertama*.

N a m a : Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003



ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 197409152000031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	- Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	
		- Pidana	100 %
		- Perdata	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	
		Banding :	
		- Pidana	20 %
		- Perdata	20 %
		Kasasi :	
		- Pidana	20 %
		- Perdata	20 %
		Peninjauan Kembali :	
		- Pidana	20 %
		- Perdata	20 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan mengajukan upaya hukum Banding	85 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan mengajukan upaya hukum Kasasi	90 %		
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %		
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %

5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90 %		
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	97 %		
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	97%		
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %		
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJip Minimal " BB "	75		
		b. Predikat Pembangua Zona Integritas WBK / WBBM	WBK		
		c. Nilai IPK	92 %		
		d. Nilai IKM	92 %		
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"		
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %		
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %		
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98%		
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	95 %		
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %		
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %		
		7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
				b. Jumlah Kapasitas bandwicth yang memadai	50 Mpbs
c. Prosestase distribusi surat	100 %				
d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98 %				
e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %				
f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	3				
g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35				
h. Jumlah layanan di Pengadilan	5				
i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 org				
j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	34 org				
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %				
l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2				
m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2				
n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 Unit				
o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12				

8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %
---	---	---	------

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023 tersebut didukung dengan Anggaran rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.531.349.000.00.
	A. Layanan Umum	Rp 6.669.000.00.
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 4.085.459.000.00.
	C. Oraperasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.439.221.000.00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 96.740.000.00.
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000.00.
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	Rp. 78.440.000.00.
	C. Layanan Bantuan Hukum	Rp 16.800.000.00.

Surabaya, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



[Handwritten Signature]
D. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum
NIP. 19570723 198303 1 003



ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 197409152000031001

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD RASJID, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA /
Pihak Kedua,



Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.
NIP. 19570723 1983 03 1003

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO /
Pihak Pertama,



ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 19740915 200003 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	
		- Pidana	100 %
		- Perdata	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91 %		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata	a. Nilai LKJip Minimal " BB "	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK

	kelola yang baik	c. Nilai IPK	92 %
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98%
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwicht yang memadai	100 Mbps
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98 %
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 org
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126 org
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 Unit
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 tersebut didukung dengan Anggaran rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.604.987.000.00.
	A. Layanan Umum	Rp 5.604.987.000.00.
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 4.176.650.000.00.
	C. Oraperasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.428.337.000.00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 107.940.000.00.
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000.00.
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	Rp. 78.440.000.00.
	C. Layanan Bantuan Hukum	Rp 28.000.000.00.

Surabaya, 08 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA /
Pihak Kedua,



Dr. H. KRESNA MENON S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 1983 03 1003

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO /
Pihak Pertama,



ACHMAD RASJID, S.H.
NIP. 19740915 200003 1001



PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

NOMOR : 162 / KPN.W14-U18 / OT1.2 / 1 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikn keyakinan mengenai akurasi, keadilan dan keabsahan data / informasi kinerja yang berkualitas ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas ini ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2015-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi ;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Memperhatikan : Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/OT.1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP meliputi : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB.**

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai Arahan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing – masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret 2024;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2024;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I T U B O N D O
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Ketua,



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS IB

Nomor : 162/KPN.PN.W14.U18/OT1.2/I/2024

Tanggal: 03 Januari 2024

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJI) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB.**

NO.	NAMA /NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Achmad Rasjid , S.H. NIP. 19740915 20003 1 001	Ketua	Penanggung Jawab
2	I Gede Karang Anggayasa, S.H.,MH. NIP. 19770416 200021 2 001	Hakim	Koodinator Validasi Data
3	I Ketut Sueca S.H NIP.19800927 200212 1 002	Panitera	Ketua
4	Sutoto Winarno, S.H. NIP. 19650221 199403 1 002	Sekretaris	Sekretaris
5	Slamet Ridwan SE,SH.M.Hum. 19710616 199303 1.003	Panitera Muda Pidana	Anggota
6	Haryono, S.H. 19701016 199303 1 002	Panitera Muda Perdata	Anggota
7	Abd. Mukti , S.H. NIP. 19660627 199303 1 005	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Iwan Mulyono, S.H. NIP. 19690514 198903 1 001	Kasubag. PTIP	Anggota
9	Annang Mardiyanto, S.H NIP. 196601131993031005	Kasubag. Ortala	Anggota
10	Intan Mustika Atmaningrum, S.H. NIP. 19840528 2005 02 2 001	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
11	Rosihan Luthfi, S.H. NIP. 19770113 200212 1 003	Hakim	Tim Pereviu Laporan Kinerja

Ditetapkan di : S I T U B O N D O

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Ketua,



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS IB
Nomor : 162/KPN.PN.W14.U18/OT1.2/I/2024
Tanggal: 03 Januari 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB.**

NO	JABATAN TIM	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Situbondo
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6	Tm Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Ditetapkan di : S I T U B O N D O
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

Ketua,



POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



Output	Output	Output
Penyelesaian Perkara	Penyelesaian Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu
	Output	Output
	Penyediaan Layanan Posbakum	Pelaksanaan Tindak lanjut Terhadap Putusan Perkara Perdata

Output	Output	Output	Output
Pengembangan SDM yang Profesional & berkelanjutan	Terciptanya regulasi & tata kelola yang baik	Terciptanya Pelayanan Kesekretariatan yang Baik & Prima	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan

Panitera Pengganti

Jurusita

Jurusita Pengganti

Pelaksana

Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan			
Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Prosentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	Prosentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	Prosentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu	Prosentase pengusulan pensiun tepat waktu	Nilai LKJIP minimal "BB"	Predikat Pembangunan Zona Integritas. WBK / WBBM	Nilai IPK	Nilai IKM	
Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	Prosentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Prosentase realisasi anggaran belanja	Prosentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	Prosentase nilai Kinerja Anggaran	Prosentase kedisiplin masuk kerja	Pelanggaran disiplin	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan	Jumlah kapasitas bandwidth yang memadai	Prosentase distribusi surat	Prosentase tindak lanjut surat tepat waktu	Prosentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat
Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator
Jumlah kerjasama antar instansi terkait	Jumlah berita tentang satker yang dimuat di media	Jumlah Layanan Pengadilan	Jumlah pengguna layanan pengadilan	Jumlah layanan bantuan hukum	Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	Jumlah pemeliharaan gedung	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga		Terpenuhinya kebutuhan sarpras dalam mendukung pelayanan peradilan

Operational Area